

## Faktor Agama Dalam Pilkada

### Faktor Agama Dalam Pilkada

Apakah pemilih dengan agama latar belakang agama tertentu lebih cenderung untuk memilih calon dengan agama yang sama dengan dirinya.

Hal. 1

### Agama, Partai Politik dan Pemilih

Penggunaan asas Islam atau partai yang didirikan oleh kelompok Islam tidak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara lain juga berlangsung kontestasi politik dimana ada partai yang berasaskan Islam.

Hal. 17

**P**ILKADA sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk menyelidiki lebih dalam kaitan antara agama dengan perilaku pemilih. Arena Pilkada memberi kesempatan lebih baik bagi peneliti di bidang perilaku pemilih untuk melihat kaitan antara agama dengan pemilih—dibandingkan dengan katakanlah arena pemilihan presiden. Hal ini karena dalam Pemilu Presiden, umumnya kandidat yang maju semuanya berlatar belakang Islam. Pengalaman Pemilu 2004 memperlihatkan semua calon presiden dan wakil presiden beragama Islam. Karena latar belakang agama calon sama, agak sulit untuk menyimpulkan bahwa latar belakang agama pemilih berperan / tidak berperan dalam memilih calon. Hal ini berbeda dengan Pilkada. Dalam Pilkada, banyak kita jumpai, adanya calon (baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah) yang berbeda agama bertarung dalam satu wilayah untuk memperebutkan posisi kepala daerah. Fakta ini menarik untuk melihat apakah pemilih dengan latar belakang agama tertentu lebih cenderung untuk memilih calon dengan agama yang sama. Dari sejumlah Pilkada yang telah lewat, penulis mengambil tiga kasus Pilkada di mana ada kandidat (kepala daerah atau wakil) dengan agama yang berbeda—yakni Pilkada di Kota Ambon, Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Di ketiga wilayah tersebut, calon yang maju mempunyai latar belakang agama yang berbeda.

Dari ketiga kasus Pilkada (Kota Ambon, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow) tampak adanya pola dan peran yang berbeda. Di Kota Ambon, agama tampak tidak memainkan peran dalam preferensi pemilih. Dalam arti pemilih yang beragama Islam tidak lantas lebih condong untuk memilih kandidat yang beragama Islam, dan demikian juga sebaliknya. Sementara di Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow, latar belakang agama kandidat tampak mempengaruhi preferensi pemilih. Di kalangan pemilih Islam misalnya, lebih cenderung memilih pasangan kandidat di mana terdapat calon yang beragama Islam. Kasus ini terjadi dalam Pilkada Kota Manado. Atau sebaliknya, di kalangan pemilih Kristen lebih cenderung memilih pasangan kandidat di mana terdapat calon yang beragama Kristen. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

DALAM literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting. Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu, atau partai yang diidentikkan dengan agama tertentu. Di Amerika Serikat pada awal-awal tahun 1930-an sampai dengan 1980-an mayoritas pengikut Katolik Roma dan Yahudi biasanya mendukung partai Demokrat, sedangkan mayoritas pengikut Protestan mendukung partai Republik. Tetapi kaitan antara agama dengan perilaku pemilih ini bersifat fluktuatif dan tidak konstan dari satu waktu ke waktu lain. Di Amerika sendiri misalnya, kecenderungan politik berdasarkan agama seperti ini sepertinya di tahun 1980-an hingga sekarang.<sup>1</sup>

Di Indonesia, faktor agama juga banyak dikaji oleh pengamat dan peneliti perilaku politik. Alasannya, agama masih dipandang penting oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang menjadi pemeluk agama yang taat. Fokus yang banyak diteliti adalah apakah pemilih dengan latar belakang agama tertentu cenderung memilih partai atau kandidat dengan agama yang sama dengan dirinya. Pemilih Islam, misalnya apakah cenderung memilih partai atau kandidat yang berlatar belakang Islam dibandingkan agama lain. Studi yang dilakukan oleh Liddle dan Mujani menghasilkan temuan hubungan antara agama dengan perilaku memilih memang positif, dalam arti menjadi seorang Muslim cenderung untuk memilih partai Islam dan sebaliknya menjadi seorang non-Muslim cenderung memilih partai non Islam. Tetapi hubungan agama dan perilaku pemilih

lemah. Faktor agama belum menjadi penjelas penting dalam perilaku pemilih seseorang.<sup>2</sup>

Pilkada sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk menyelidiki lebih dalam kaitan antara agama dengan perilaku pemilih. Arena Pilkada memberi kesempatan lebih baik bagi peneliti di bidang perilaku pemilih untuk melihat kaitan antara agama dengan pemilih---dibandingkan dengan katakanlah arena pemilihan presiden. Mengapa? Hal ini karena dalam Pemilu Presiden, umumnya kandidat yang maju semuanya berlatar belakang Islam. Pengalaman Pemilu 2004 memperlihatkan semua calon presiden dan wakil presiden beragama Islam. Karena latar belakang calon sama, agak sulit untuk menyimpulkan bahwa latar belakang pemilih berperan/ tidak berperan dalam memilih calon. Hal ini berbeda dengan Pilkada. Dalam Pilkada, banyak kita jumpai, adanya calon (baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah) yang berbeda agama. Fakta ini menarik untuk melihat apakah pemilih dengan latar belakang agama tertentu lebih cenderung untuk memilih calon dengan agama yang sama.

Dari sejumlah Pilkada yang telah lewat, penulis mengambil tiga kasus Pilkada dimana ada kandidat (kepala daerah atau wakil) dengan agama yang berbeda—yakni Pilkada di Kota Ambon, Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Di ketiga wilayah tersebut, ada calon dengan latar belakang agama yang berbeda. Di samping itu, di ketiga wilayah ini, komposisi agama agak plural (Lihat Tabel 1). Di Kota Ambon dan Manado, memang mayoritas

**Tabel I : Komposisi Agama di Kota Ambon, Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow**

| Agama             | Kota Ambon | Kota Manado | Kabupaten Bolaang Mongondow |
|-------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| Islam             | 26.2%      | 31.4%       | 73.3%                       |
| Kristen Protestan | 3.1%       | 60.7%       | 23.1%                       |
| Kristen Katolik   | 70.6%      | 5%          | 1.2%                        |
| Hindu             | 0.1%       | 0.1%        | 2.1%                        |
| Budha             | 0%         | 0.7%        | 0%                          |
| Lainnya           | 0%         | 1.1%        | 0.3%                        |

Sumber : diolah dari BPS, 2002.

<sup>1</sup> Austin Ranney, *Governing: An Introduction to Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc, 1999.

<sup>2</sup> R. William Liddle dan Saiful Mujani, *The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy*, Laporan penelitian, 2003; R. William Liddle dan Saiful Mujani *Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*, Laporan penelitian, 2007.

penduduk beragama Islam, tetapi dalam jumlah cukup besar terdapat penduduk beragama Kristen. Sebaliknya di Kabupaten Bolaang Mongondow, mayoritas penduduk beragama Islam. Tetapi dalam jumlah cukup besar terdapat penduduk beragama Kristen.

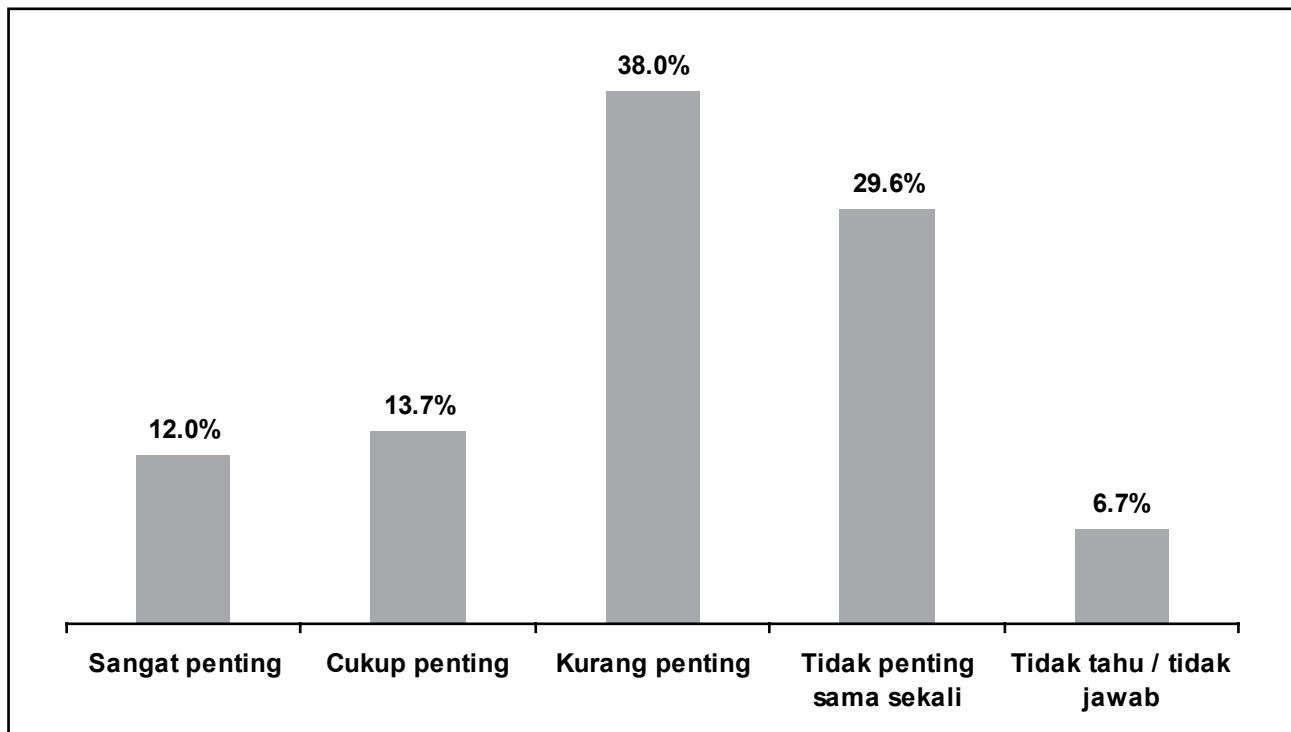
### Kasus Pilkada Kota Ambon

Pilkada Kota Ambon adalah kasus yang menarik ketika kita membahas mengenai kaitan antara agama dan perilaku pemilih. Ini karena dua alasan. Pertama, meski mayoritas penduduk beragama Kristen (Protestan), dalam jumlah cukup besar (26.2%) penduduk Ambon beragama Islam. Kedua, Kota Ambon pernah mengalami konflik agama yang berkepanjangan antara Islam dan Kristen. Menarik untuk melihat apakah sentimen agama turut menjadi dasar bagi pemilih di Ambon dalam memilih kandidat. Singkatnya, apakah pemilih Islam lebih cenderung memilih kandidat yang beragama Islam dan sebaliknya pemilih Kristen cenderung memilih kandidat yang beragama Kristen.

Pilkada Kota Ambon sendiri diikuti oleh lima pasangan calon, masing-masing Hendrik Hattu-Iskandar Walla; John

Malaiholo-Irma Betaubun; Made Rachman Marasabessy-Aloysius Lesubun; M.J. Papilaya-Olivia Ch. Latuconsina dan pasangan Richard Louhenapessy-Syarief Hadler. Pilkada dimenangkan oleh pasangan M.J. Papilaya-Olivia Ch. Latuconsina dengan perolehan suara 36.12%. Dari lima kandidat walikota, hanya satu yang beragama Islam, yakni Made Rachman Marasabessy.

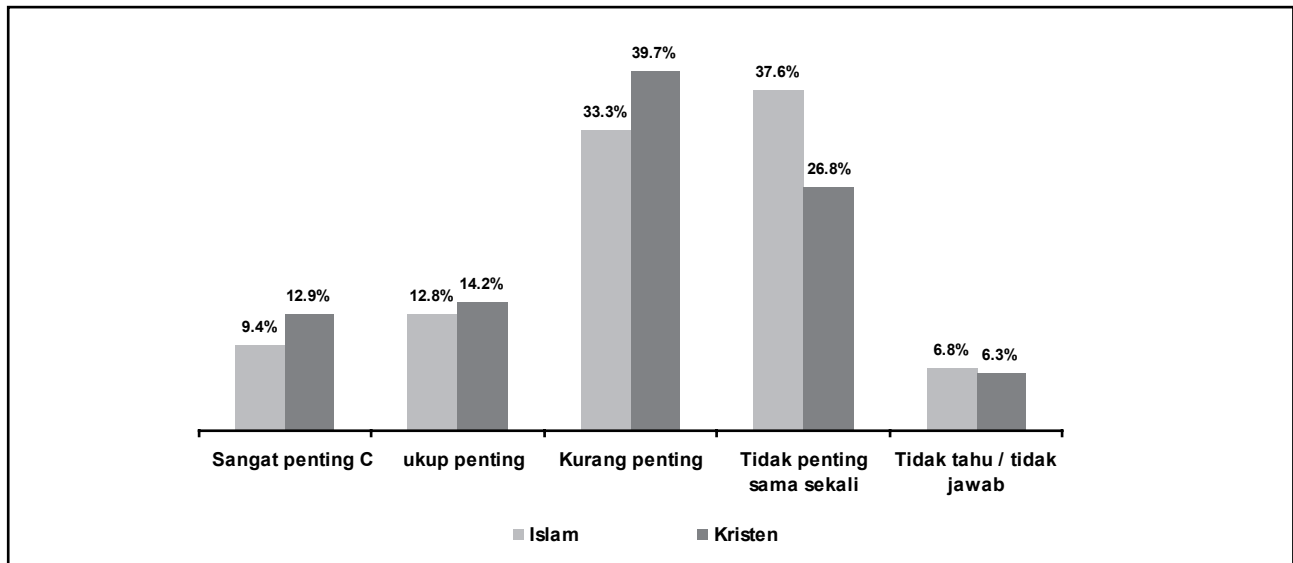
Yang menarik, ketika responden ditanya apakah latar belakang agama kandidat sebagai hal yang penting diperhatikan atau tidak, sebagian besar (67.6%) mengatakan kurang penting atau tidak penting sama sekali (Grafik 1). Baik pemilih Islam ataupun Kristen sama-sama menyatakan latar belakang kandidat bukan menjadi pertimbangan penting dalam memilih calon (Grafik 2). Pendapat pemilih di Ambon ini menunjukkan dalam pendapat (opini) mereka, sentimen agama tidak penting. Pendapat ini terbukti kalau kita lihat bagaimana distribusi pemilih menurut agama (Grafik 3, 4 dan 5). Di kalangan pemilih Islam, suara Made Rachman Marasabessy tidak lah mayoritas. Di kalangan pemilih Islam, justru pasangan Richard Louhenapessy-Syarief Hadler yang mendapat



**Grafik 1: Penilaian Atas Pentingnya Kandidat Kepala Daerah dari Agama Mayoritas (Kota Ambon)**

Sumber: Survei LSI, Maret 2006

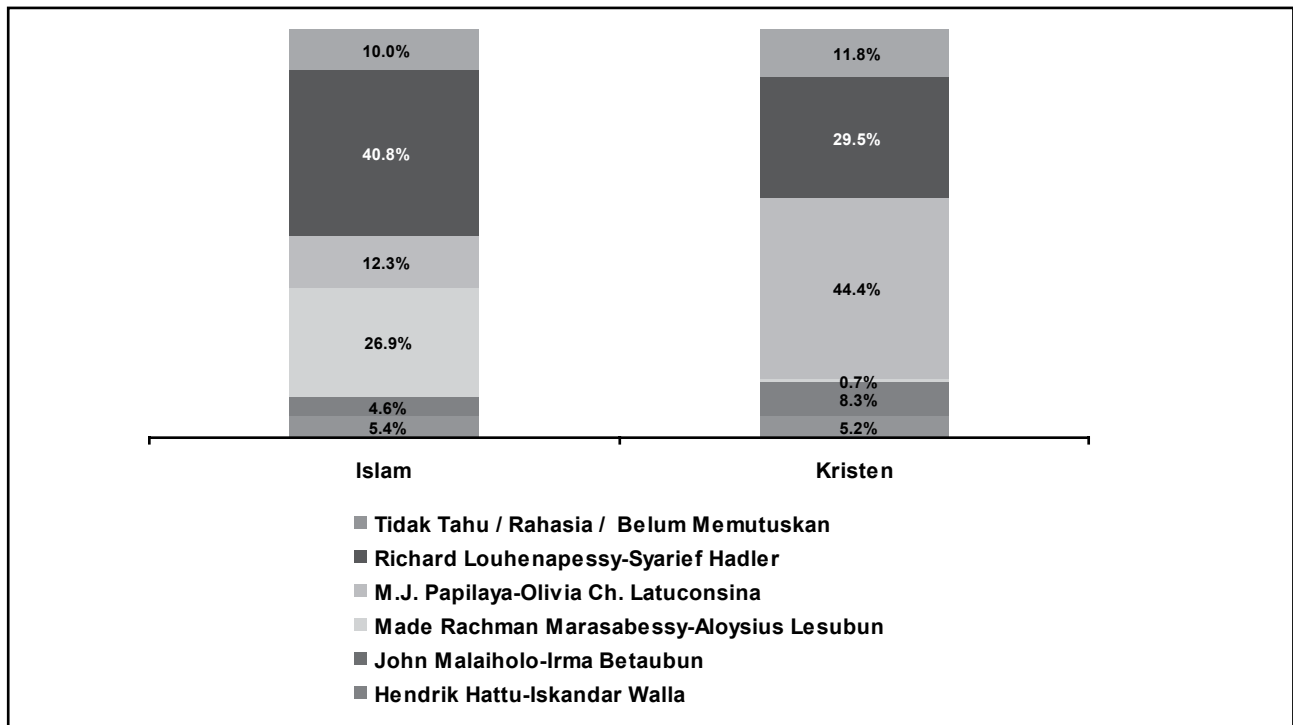
Q: Menurut Ibu/Bapak seberapa penting kriteria bahwa Walikota Ambon sebaiknya orang yang berasal dari agama mayoritas di Ambon?



**Grafik 2: Penilaian Atas Pentingnya Kandidat Kepala Daerah dari Agama Mayoritas Menurut Agama Pemilih (Kota Ambon)**

Sumber: Survei LSI, Maret 2006

Q: Menurut Ibu/Bapak seberapa penting kriteria bahwa Walikota Ambon sebaiknya orang yang berasal dari agama mayoritas di Ambon?



**Grafik 3: Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Ambon Menurut Agama Pemilih**

Sumber: Survei LSI, Mei 2006

Q: Pilkada Kotmadya Ambon akan diikuti oleh 5 pasangan calon WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA. Dari 5 pasangan kandidat Walikota/ Wakil Walikota yang akan maju berikut, siapa Walikota/ Wakil Walikota mana yang akan ibu/bapak pilih?; Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi Walikota?

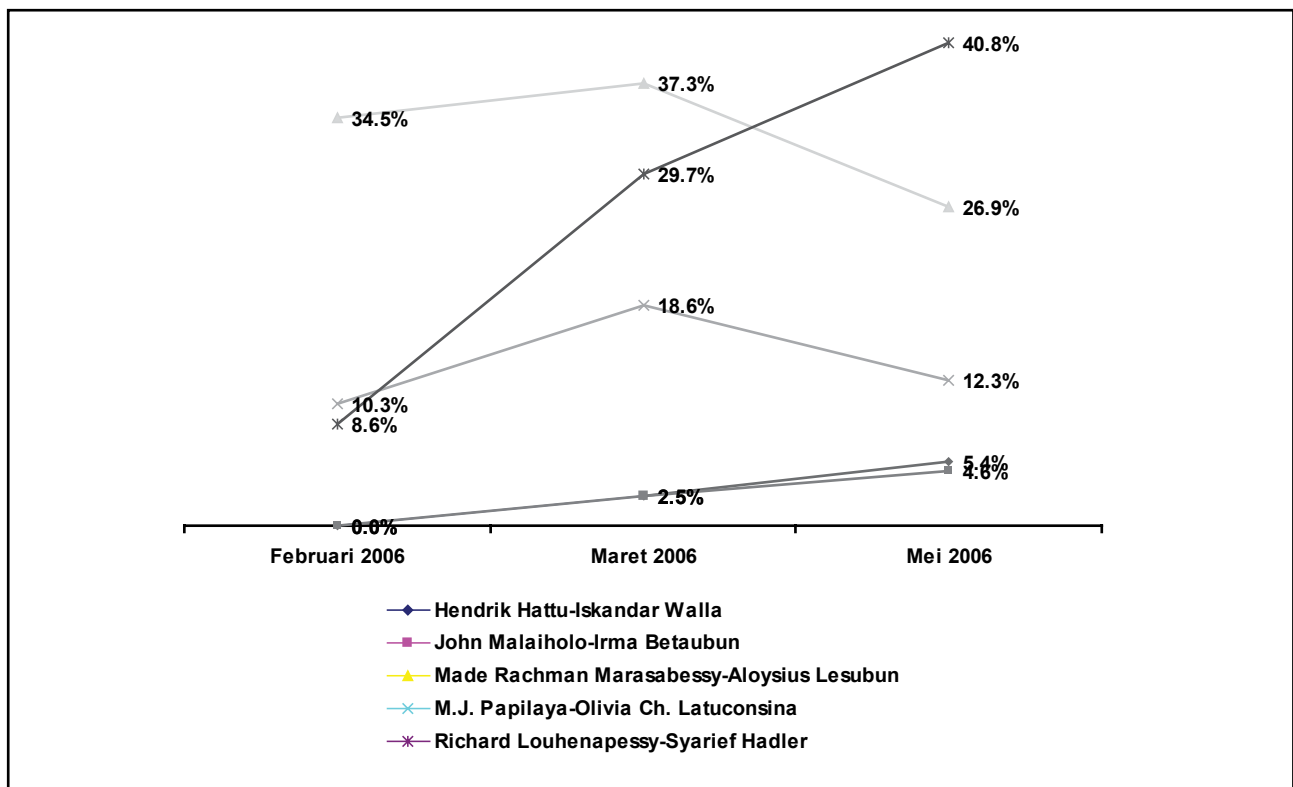
suara terbesar. Di kalangan pemilih Islam, suara untuk Made Rachman Marasabessy bahkan cenderung menurun, dari semula 34.5% di bulan Februari 2006 menjadi 26.9% di bulan Mei 2006 (Lihat Grafik 4).

Ada sejumlah kemungkinan yang bisa menjelaskan mengapa sentimen agama ini kurang bermain dalam Pilkada Kota Ambon. Kemungkinan pertama, konflik agama yang sedemikian panjang membuat warga Ambon sudah bosan dengan pembedaan berdasar agama. Ini makin terlihat ketika dalam kampanye, isu-isu yang bernada konflik agama praktis tidak terlihat. Kemungkinan kedua, perpaduan kandidat Islam dan Kristen (sebagai walikota dan wakil walikota) di semua kandidat tampaknya membuat pemilih tidak melihat Pilkada sebagai pertarungan

antar calon Islam lawan calon Kristen. Benar tidaknya kemungkinan ini, tentu harus didalami lewat penelitian lebih lanjut.

#### Kasus Pilkada Kota Manado

Pilkada lain yang menarik untuk dibahas dalam konteks perilaku pemilih adalah Pilkada Kota Manado. Pilkada Kota Manado diikuti oleh 6 pasangan calon, masing-masing: Audy Rumayar - Yani Weku; Daniel Masengi - Jafar Alkatiri; Jimmy Rimba Rogi - Abdi Buhari; Teddy Kumaat - Elvie Watuseke; Wempie Frederich - Yermia Damongilala dan pasangan JJ. Lontaan - Eli Lihyang. Pilkada sendiri dimenangkan oleh pasangan Jimmy Rimba Rogi - Abdi Buhari dengan perolehan suara 29.8%.

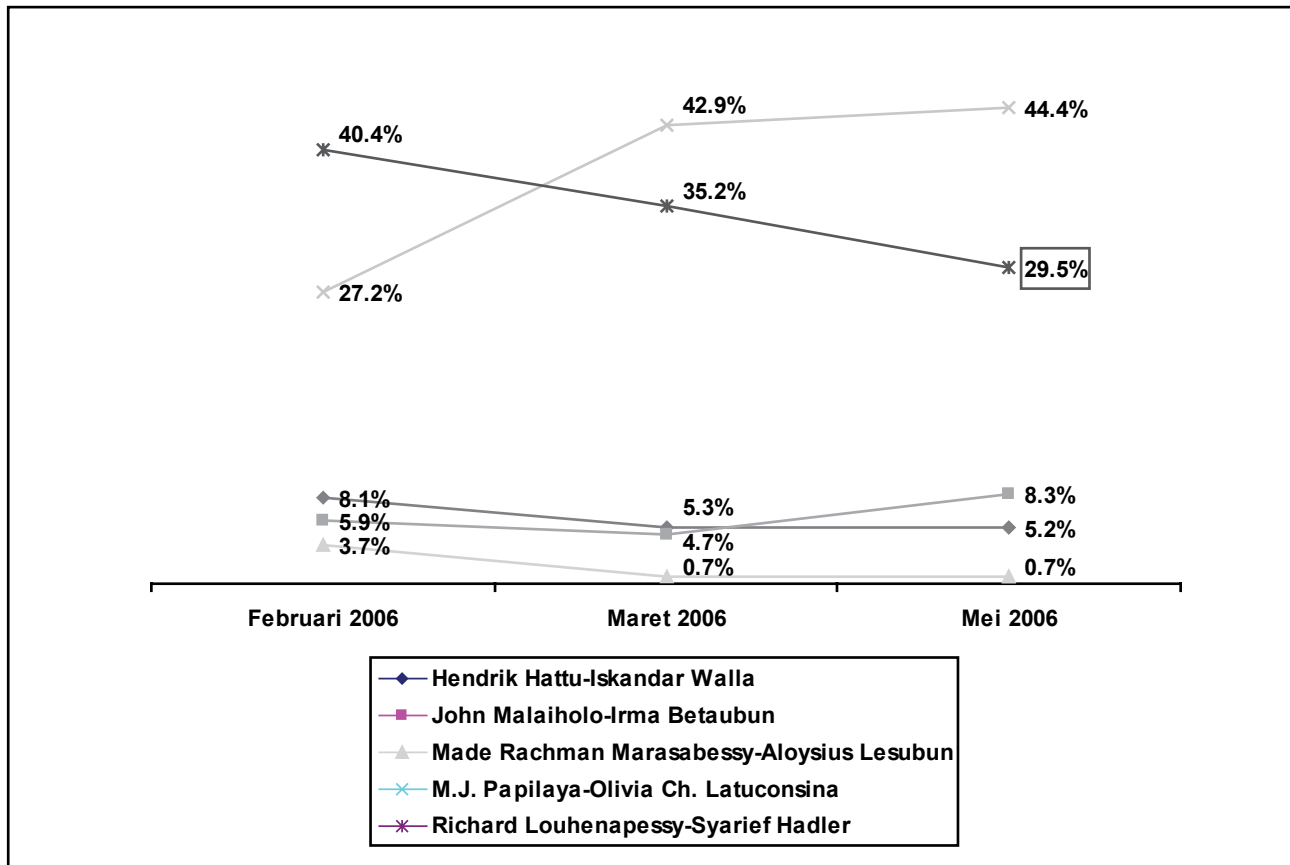


**Grafik 4: Trend Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Ambon di Kalangan Pemilih Islam**

**Keterangan:** Data diolah dari survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Februari, Maret dan Mei 2006 di Kota Ambon. Semua survei dilakukan dengan menggunakan metode penarikan sampel yang sama, yakni Multistage Random Sampling. Populasi survei adalah semua pemilih di Kota Ambon. Jumlah sampel untuk semua survei (Februari, Maret dan Mei 2006) sebanyak 440 responden (dengan sampling error plus minus 4.8% pada tingkat kepercayaan 95%). Wawancara dilakukan secara langsung (face to face interview). Di luar kesalahan dalam penarikan sampel, dimungkinkan adanya kesalahan non sampling.

**Sumber:** Survei LSI (Februari 2006, Maret 2006 dan Mei 2006)

Q: Seandainya pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Manado dilaksanakan pada hari ini. Ada 6 pasangan walikota yang akan maju, siapa yang akan ibu/bapak pilih dari calon-calon berikut?; Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi walikota/wakil walikota? (Khusus untuk survei bulan Februari 2006, tidak ditanyakan pasangan calon)



**Grafik 5: Trend Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Ambon di Kalangan Pemilih Kristen**

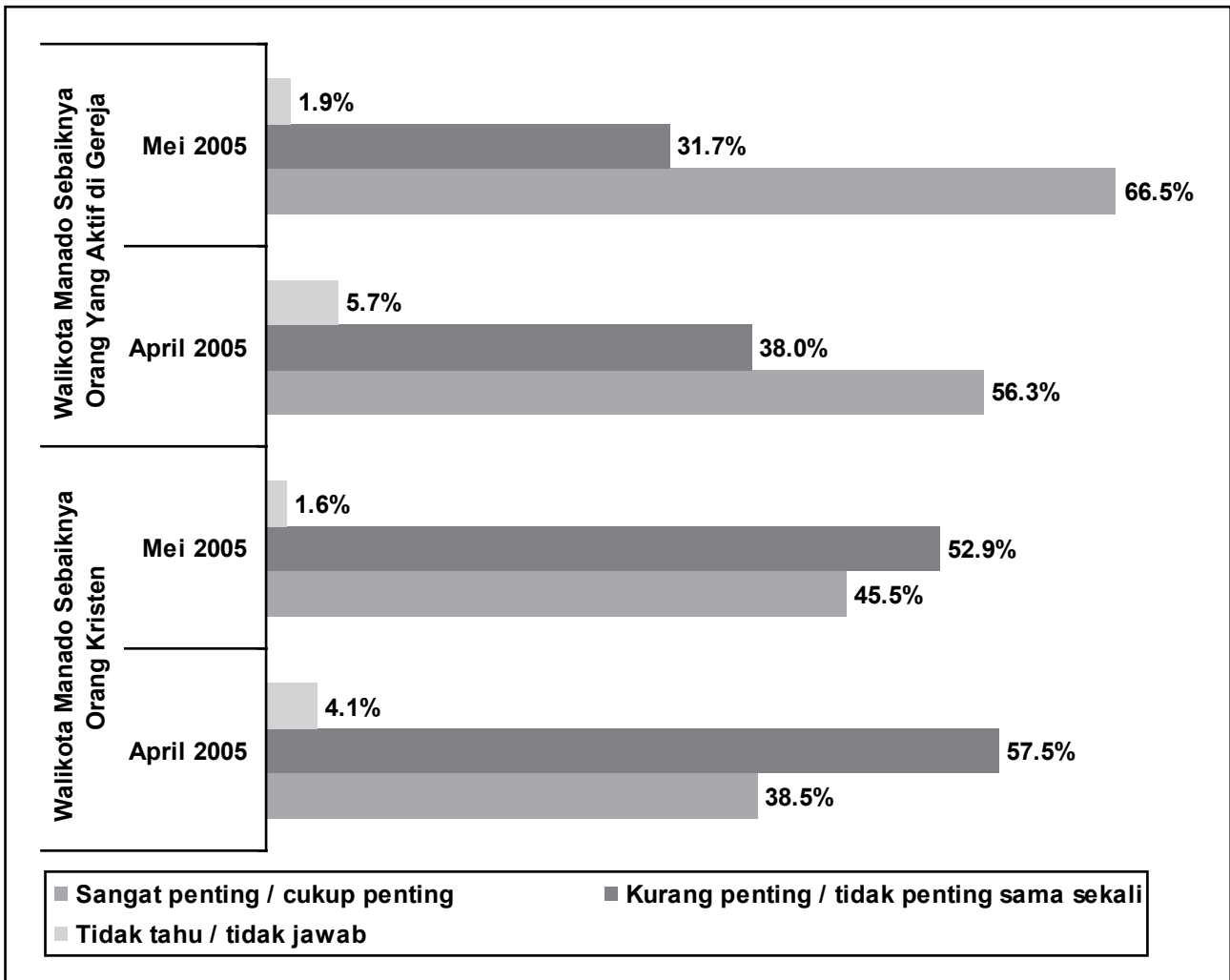
Sumber: Survei LSI (Februari 2006, Maret 2006 dan Mei 2006)

Q: Seandainya pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Manado dilaksanakan pada hari ini. Ada 6 pasangan walikota yang akan maju, siapa yang akan ibu/bapak pilih dari calon-calon berikut?; Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi walikota/wakil walikota? ( Khusus untuk survei bulan Februari 2006, tidak ditanyakan pasangan calon)

Penduduk Manado mayoritas beragama Kristen, meski demikian dalam jumlah cukup besar (31.4%) penduduk beragama Islam. Meski jumlah penduduk beragama Islam di Manado cukup besar, tidak ada kandidat beragama Islam yang "berani" mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Seakan sudah menjadi "kesepakatan tidak tertulis", bahwa calon beragama Kristen menempati sebagai kepala daerah, dan wakilnya beragama Islam. Grafik 6 dan Grafik 7 memperlihatkan sentimen pemilih di Ambon terhadap kepala daerah yang beragama Kristen. Di kalangan pemilih Kristen, latar belakang kepala daerah yang beragama Kristen dinilai penting. Sementara di kalangan pemilih Islam, latar belakang kepala daerah yang beragama Islam dinilai kurang penting.

Kandidat kepala daerah beragama Islam dan wakil kepala daerah beragama Kristen, seintas tampak seperti sebuah

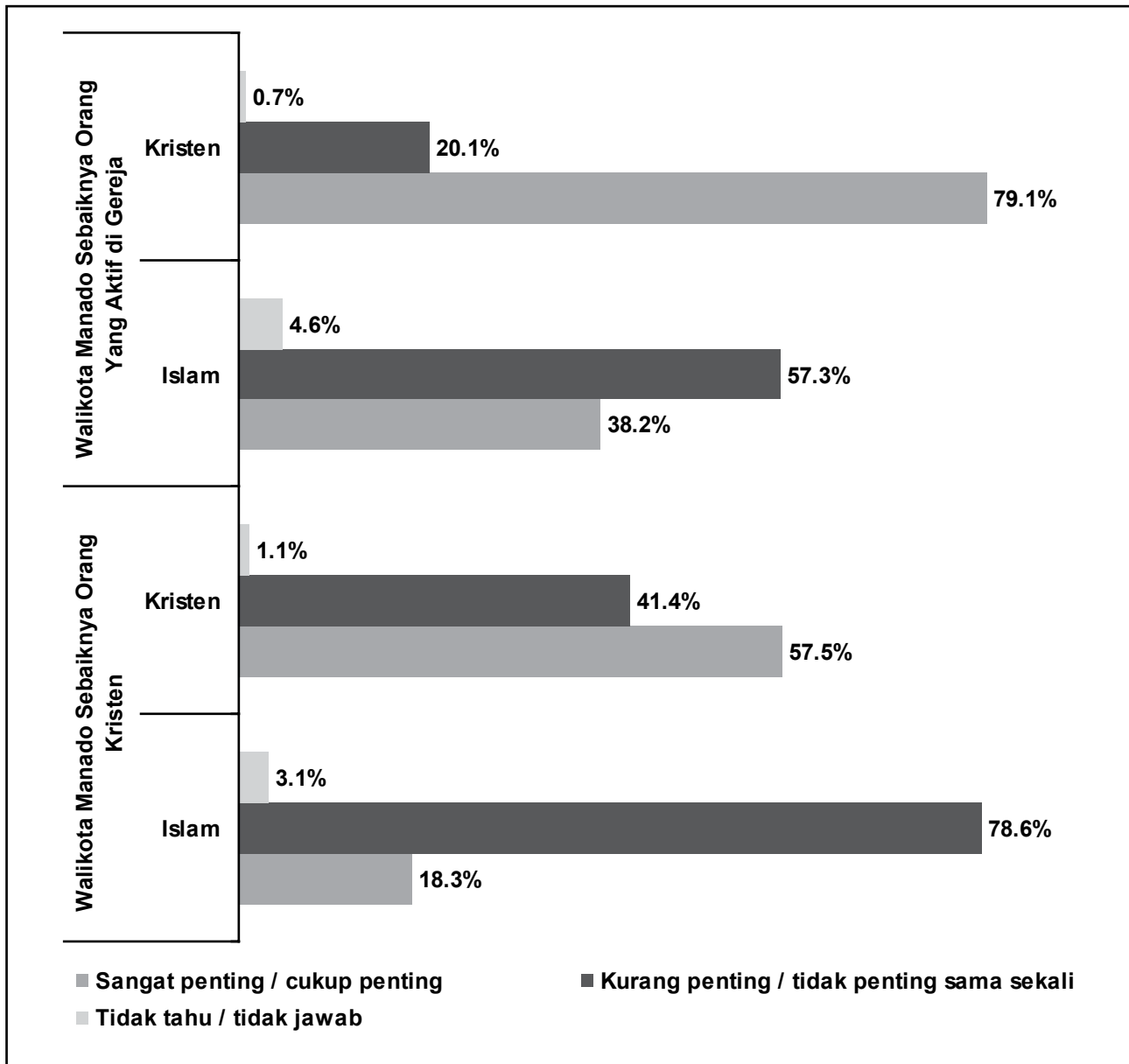
formula yang sederhana dalam mengaet dukungan pemilih baik di kalangan pemilih Islam ataupun Kristen. Tetapi formula ini bisa jadi kurang disukai di kalangan pemilih Kristen. Grafik 8 memperlihatkan masalah ini. Kandidat kepala daerah yang menggandeng wakil kepala daerah beragama Islam memang mendapat dukungan cukup baik di kalangan pemilih Islam. Misalnya Jimmy Rimba Rogi yang menggandeng Abdi Buhari berhasil mendapatkan dukungan 56.6% di kalangan pemilih Islam. Hal yang sama juga dialami oleh Daniel Masengi yang menggandeng Jafar Alkatiri dan berhasil mendapatkan 14.2% suara dari pemilih Islam. Tetapi dua kandidat ini memperoleh dukungan yang lebih kecil di kalangan pemilih Kristen. Jimmy Rimba Rogi misalnya kalah dari Wimpie Frederick di kalangan pemilih Kristen. Demikian juga Daniel Masengi hanya hanya mendapat dukungan 3.1% dari kalangan pemilih beagama Kristen.



**Grafik 6: Penilaian Atas Pentingnya Kandidat Kepala Daerah dari Agama Mayoritas (Kota Manado)**

Sumber: Survei LSI (April 2005, Mei 2005)

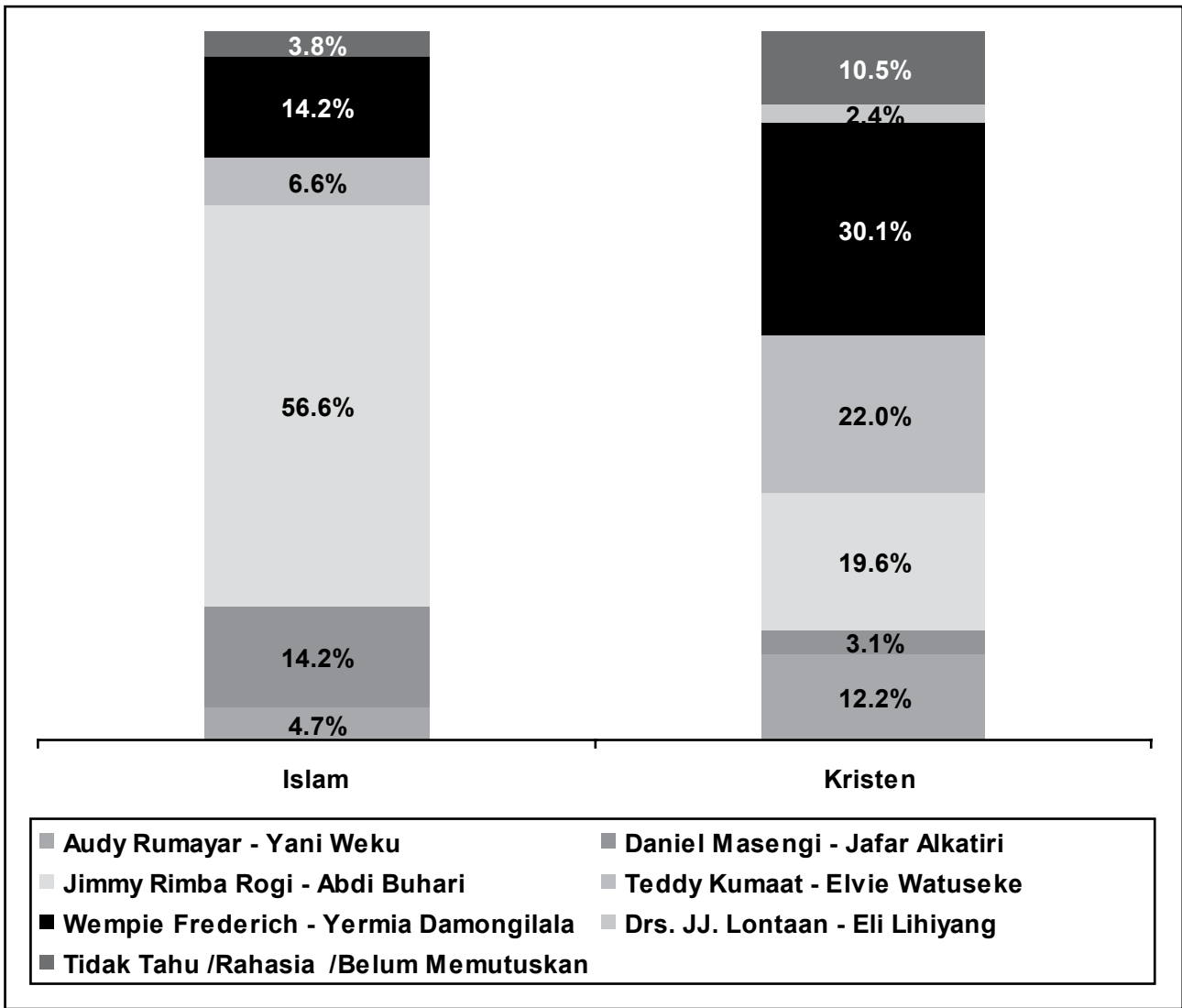
Q: Menurut Ibu / Bapak seberapa penting kriteria Walikota Manado sebaiknya orang yang beragama Kristen (Protestan)?; Q: Menurut Ibu/ Bapak seberapa penting kriteria Walikota Manado sebaiknya orang yang aktif di gereja?



**Grafik 7: Penilaian Atas Pentingnya Kandidat Kepala Daerah dari Agama Mayoritas Menurut Agama Pemilih (Kota Manado)**

Sumber: Survei LSI, Mei 2005)

Q: Menurut Ibu/ Bapak seberapa penting kriteria Walikota Manado sebaiknya orang yang beragama Kristen (Protestan)?; Q: Menurut Ibu/ Bapak seberapa penting kriteria Walikota Manado sebaiknya orang yang aktif di gereja?



**Grafik 8: Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Manado Menurut Agama Pemilih**

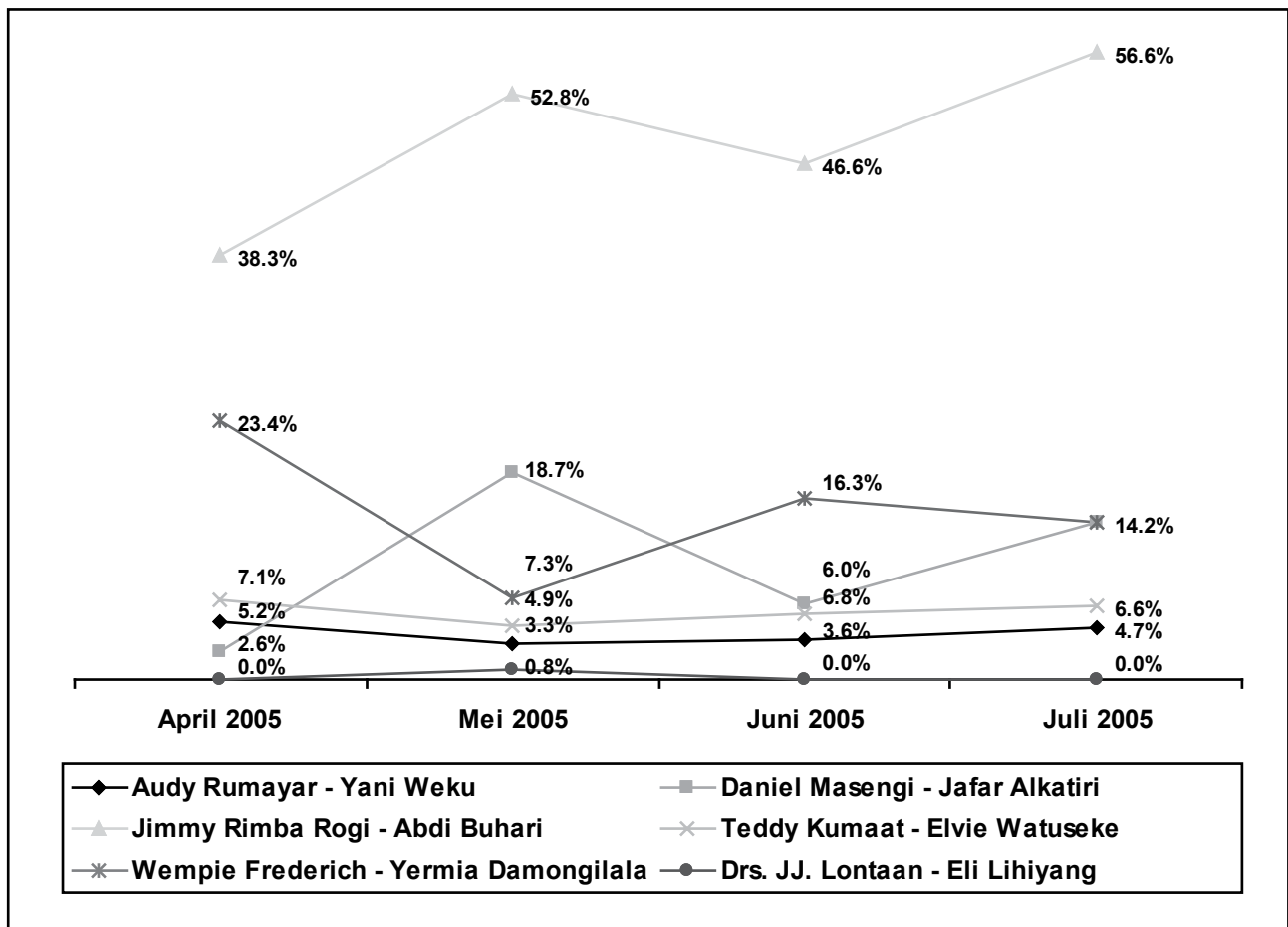
Sumber: Survei LSI, Juli 2005

Q: Seandainya pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Manado dilaksanakan pada hari ini. Ada 6 pasangan walikota yang akan maju, siapa yang akan ibu/bapak pilih dari calon-calon berikut?; Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi walikota/wakil walikota?

Grafik 9 dan 10 memperlihatkan secara lebih jelas dinamika dukungan dari pemilih ketika kandidat menggandeng wakil kepala daerah yang beragama Islam. Kita bisa bandingkan dukungan bagi kandidat di bulan April 2005 (ketika calon belum berpasangan) dengan bulan Juli 2005, ketika calon sudah menentukan pasangan. Pada bulan April 2005, di kalangan pemilih Islam, Jimmy Rimba Rogi hanya mendapat dukungan sebesar 38.3%. Suara dari kalangan Islam ini naik ketika Jimmy Rimba Rogi berpasangan dengan Abadi Buhari. Perlahan suara dari kalangan Islam untuk untuk Jimmy Rimba Rogi naik, hingga mencapai 56.6% di

bulan Juli 2005. Hal yang sama juga dialami oleh Daniel Masengi. Sebelum berpasangan dengan Jafar Alkatiri (April 2005), suara Daniel Masengi di kalangan pemilih Islam hanya sebesar 2.6%. Tren suara dari kalangan Islam naik ketika Daniel Masengi berpasangan dengan Jafar Alkatiri, hingga mencapai 14.2% di bulan Juli 2005.

Yang menarik, di kalangan pemilih Kristen, suara Jimmy Rimba Rogi dan Daniel Masengi mengalami *trend* menurun ketika mereka menentukan pasangan wakil kepala daerah yang beragama Islam. Di bulan April 2005, di kalagan



**Grafik 9: Trend Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Manado di Kalangan Pemilih Islam**

Keterangan: Data diolah dari survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan April, Mei, Juni dan Juli 2005 di Kota Manado. Semua survei dilakukan dengan menggunakan metode penarikan sampel yang sama, yakni Multistage Random Sampling. Populasi survei adalah semua pemilih di Kota Manado. Jumlah sampel untuk semua survei (April, Mei, Juni dan Juli 2005) sebanyak 440 responden (dengan sampling error plus minus 4.8% pada tingkat kepercayaan 95%). Wawancara dilakukan secara langsung (face to face interview). Di luar kesalahan dalam penarikan sampel, dimungkinkan adanya kesalahan non sampling.

Sumber: Survei LSI (April 2005, Mei 2005, Juni 2005 dan Juli 2005)

Q: Seandainya pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Manado dilaksanakan pada hari ini. Ada 6 pasangan walikota yang akan maju, siapa yang akan ibu/bapak pilih dari calon-calon berikut?; Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi walikota/wakil walikota? (Khusus untuk survei bulan April 2005, tidak ditanyakan pasangan calon)

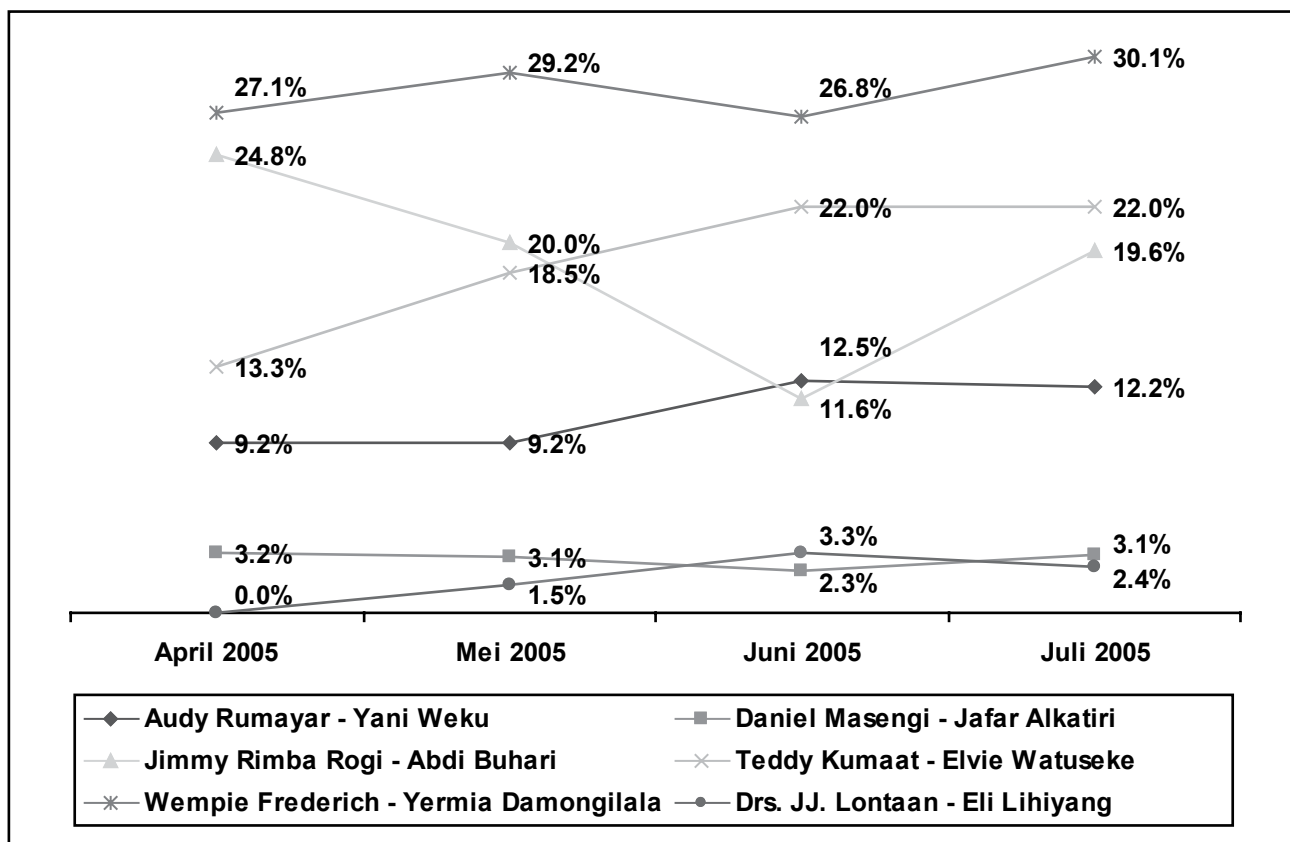
pemilih Kristen, Jimmy Rimba Rogi mendapat dukungan sebesar 24.8% suara. Suara untuk Jimmy Rimba Rogi ini menurun menjadi 19.6% di bulan Juli 2005. Perlu penelitian lebih mendalam untuk menjelaskan fenomena ini. Tetapi secara umum kita mungkin bisa menjelaskan dari sentimen pemilih yang masih menggunakan latar belakang agama kandidat sebagai bahan penilaian. Di kalangan pemilih Islam, upaya Jimmy Rimba Rogi untuk menggandeng calon wakil kepala daerah Islam mungkin mengundang simpati dan harapan suaranya terwakili.

Sentimen agama dalam Pilkada Kota Manado kurang bisa diukur mengingat semua calon kepala daerah beragama Kristen. Karena kondisi ini, preferensi pemilih di kalangan pemilih Islam dan Kristen menjadi tidak banyak berbeda.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sendiri pernah membuat "simulasi" seandainya ada calon beragama Islam tampil sebagai kandidat kepala daerah. Survei LSI di bulan April 2005 menunjukkan di kalangan pemilih Islam, kandidat yang berlatar belakang Islam lebih mendapatkan dukungan. Djafar Alkatiri misalnya mendapat dukungan 33.8% dan Abdi Buhari 18.8% di kalangan pemilih Islam (Lihat Grafik 11).

#### Kasus Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow

Kasus Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow hampir mirip dengan kasus Pilkada di Kota Manado. Peran wakil kepala daerah yang beragama minoritas penting dalam menarik pemilih dari agama minoritas di wilayah tersebut.



**Grafik 10: Trend Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Manado di Kalangan Pemilih Kristen**

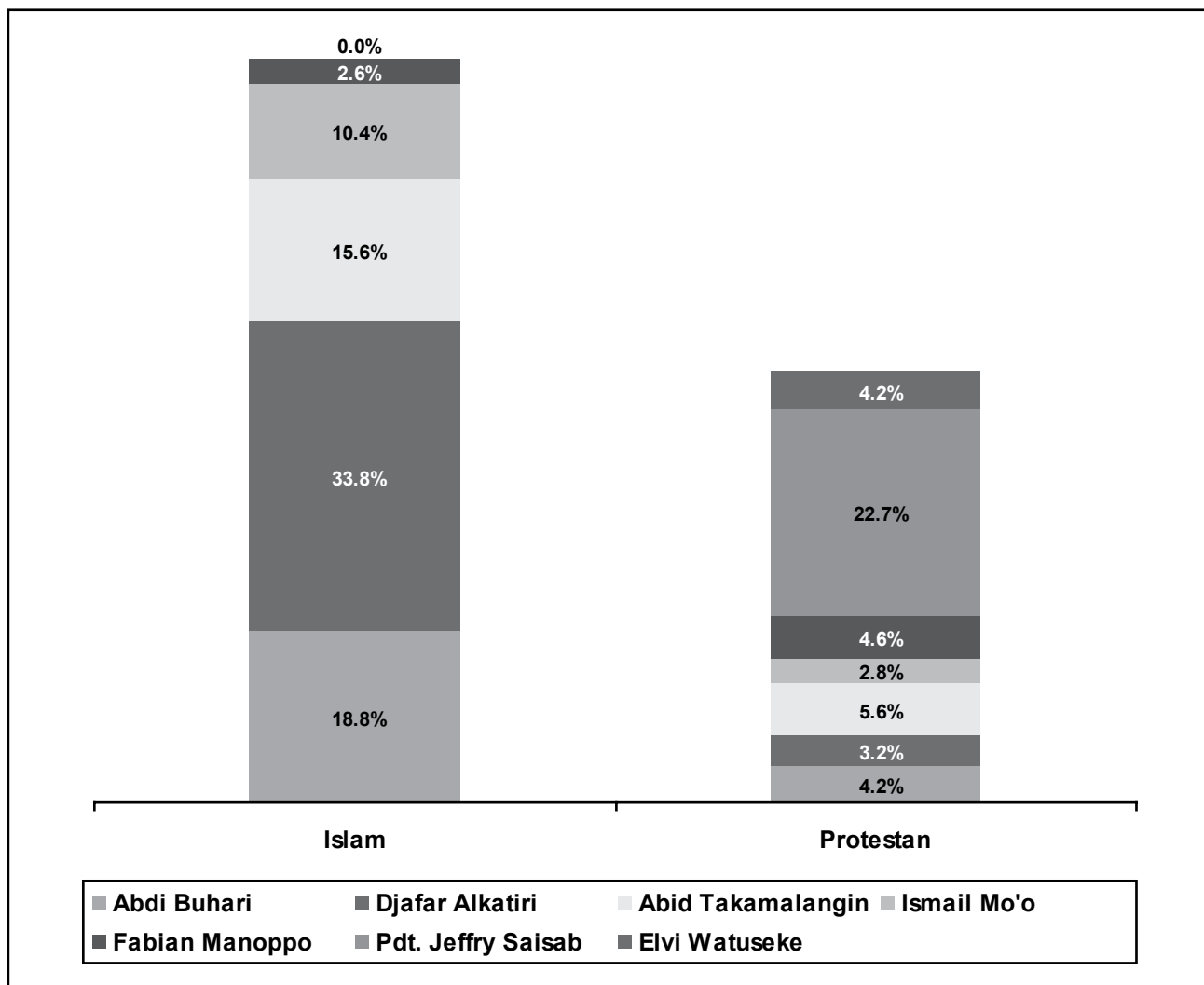
Sumber: Survei LSI (April 2005, Mei 2005, Juni 2005 dan Juli 2005)

Q: Seandainya pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Manado dilaksanakan pada hari ini. Ada 6 pasangan walikota yang akan maju, siapa yang akan ibu/bapak pilih dari calon-calon berikut? Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi walikota/wakil walikota? (Khusus untuk survei bulan April 2005, tidak ditanyakan pasangan calon)

Kabupaten Bolaang Mongondow mayoritas pemilihnya beragama Islam, meski dalam jumlah cukup besar terdapat pemilih beragama Kristen (Protestan). Pilkada diikuti oleh 4 pasangan calon, masing-masing Syamsudin Mokoginta-Suryono Wijoyo; Marlina Moha Siahaan-Sehan Mokoagow; Roesnaningsih Mamonto-Danil J. Moniaga dan pasangan Djelantik Mokodompit-Wahid Makalalag. Pilkada dimenangkan oleh pasangan Marlina Moha Siahaan-Sehan Mokoagow dengan suara 46.65%.

Keempat calon bupati semuanya berlatar belakang agama Islam. Tidak ada satupun yang beragama Kristen.

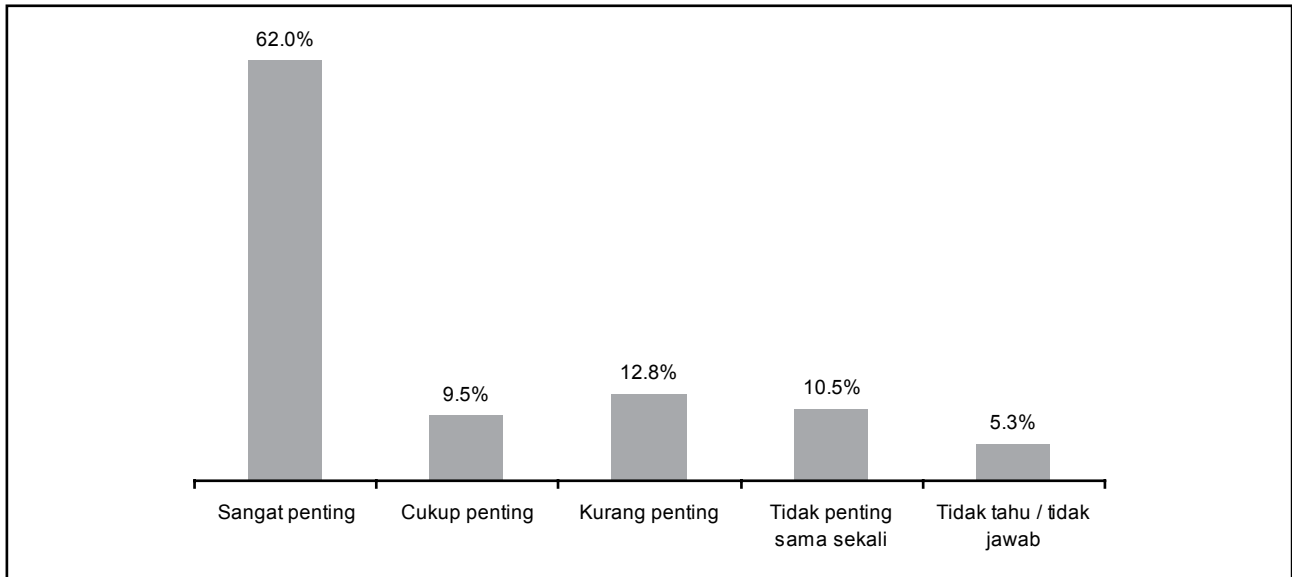
Kemungkinan karena wilayah ini mayoritas beragama Kristen mengakibatkan tidak ada calon Kristen yang "berani" tampil. Pemilih di Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri menganggap penting kepala daerah yang beragama Kristen (Lihat Grafik 12). Jika dibandingkan pendapat pemilih Islam dan Kristen ada perbedaan dalam menilai penting tidaknya kepala daerah yang beragama Islam. Di kalangan pemilih Islam, latar belakang kepala daerah yang beragama Islam dinilai penting, sementara di kalangan pemilih Kristen, latar belakang kepala daerah yang beragama Islam dinilai kurang penting (Grafik 13).



**Grafik 11: Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kota Manado Menurut Agama Pemilih**

Sumber: Survei LSI, April 2005

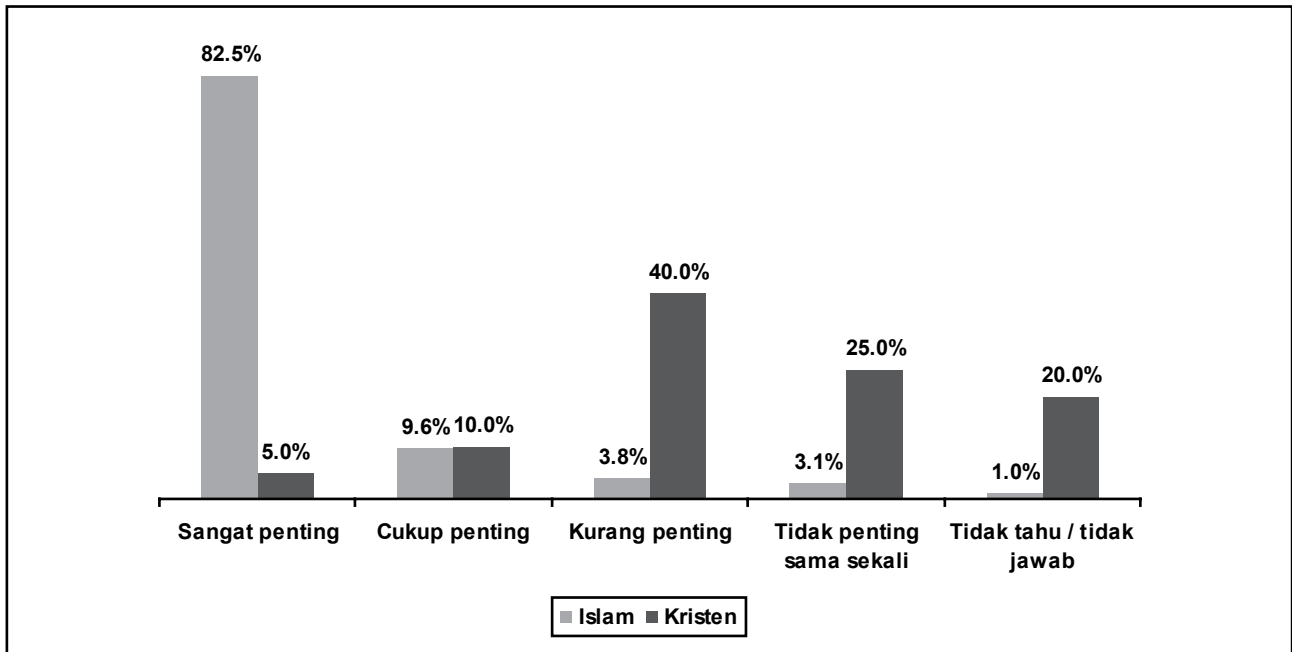
Q: Seandainya ada 7 orang yang akan maju mencalonkan diri sebagai calon Walikota Manado, Siapakah yang akan Ibu/Bapak pilih dari nama ini? (jawaban rahasia/ tidak tahu/ tidak jawab/ belum memutuskan, tidak ditampilkan dalam grafik ini).



**Grafik 12: Penilaian Atas Pentingnya Kandidat Kepala Daerah dari Agama Mayoritas (Kabupaten Bolaang Mongondow)**

Sumber: Survei LSI , September 2005

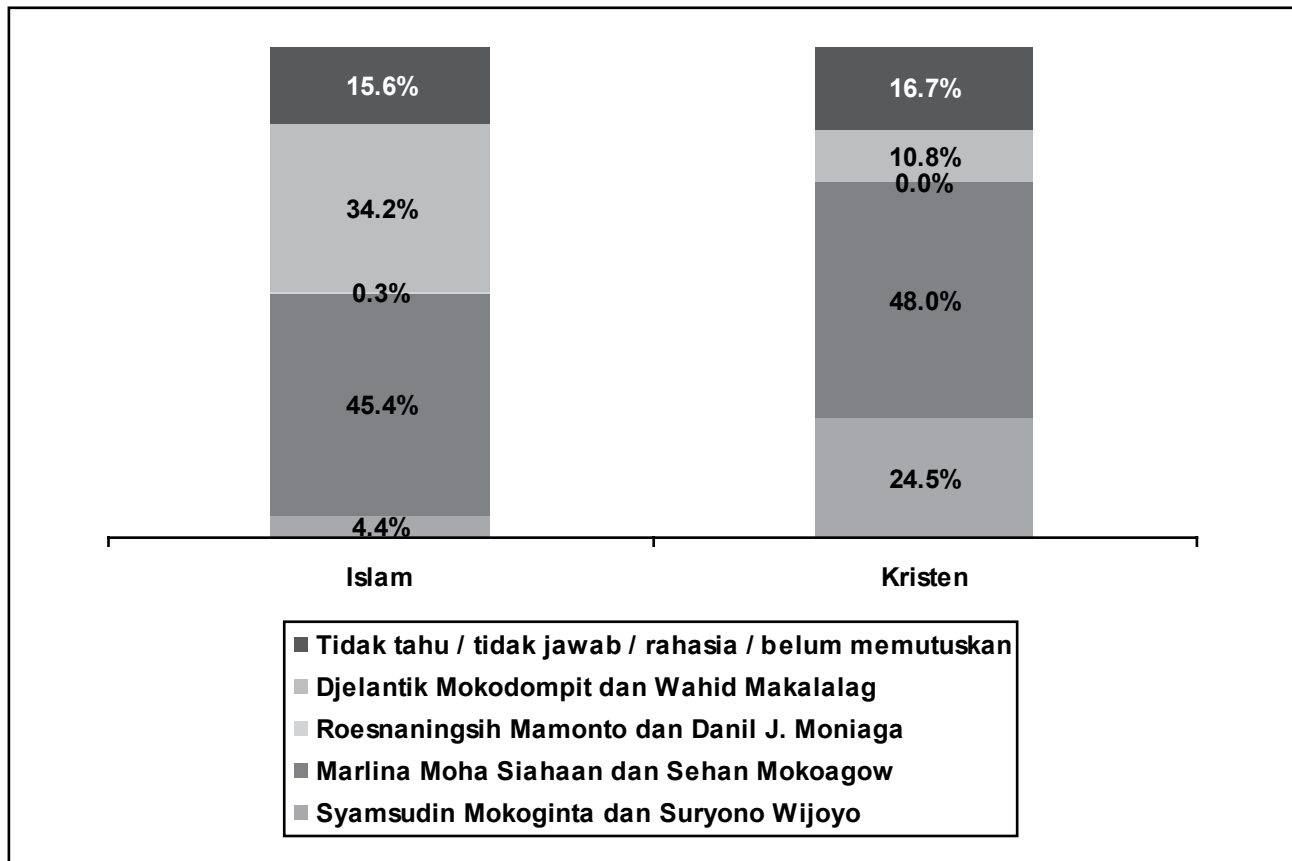
Q: Seberapa penting kriteria menurut Ibu/ Bapak bahwa Bupati Bolaang Mongondow sebaiknya orang yang beragama Islam?



**Grafik 13: Penilaian Atas Pentingnya Kandidat Kepala Daerah dari Agama Mayoritas Menurut Agama (Kabupaten Bolaang Mongondow)**

Sumber: Survei LSI , September 2005

Q: Seberapa penting kriteria menurut Ibu/Bapak bahwa Bupati Bolaang Mongondow sebaiknya orang yang beragama Islam?



**Grafik 14: Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Menurut Agama Pemilih**

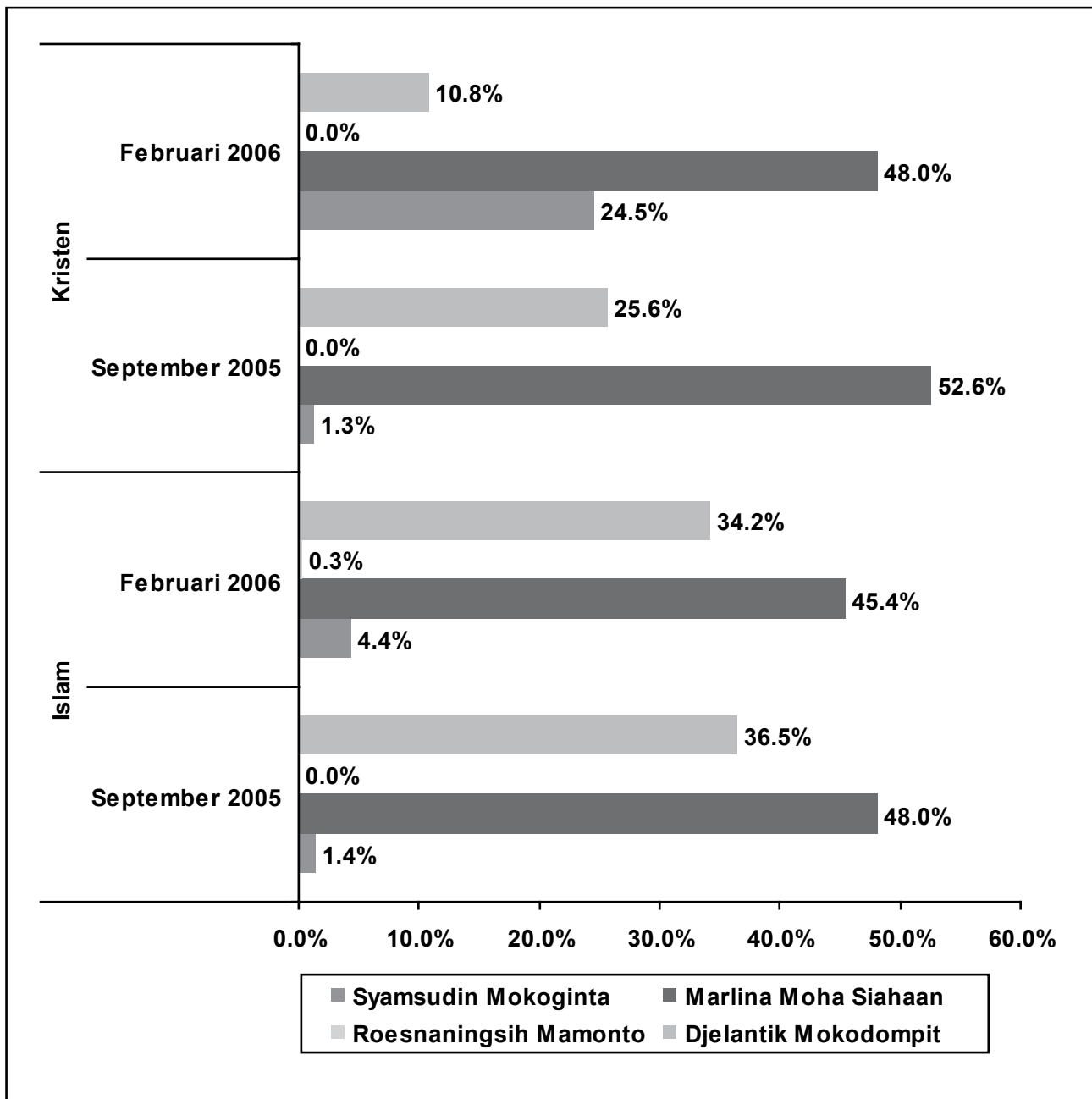
Sumber: Survei LSI, Februari 2006

Q: Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow akan dilakukan Maret ini. Ada empat pasangan bupati dan wakil bupati yang akan maju dalam pemilihan. Dari empat pasangan bupati dan wakil bupati ini, mana yang akan Ibu/ Bapak pilih?; Q: Kalau "belum tahu" atau "rahasia", di antara calon-calon tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi Bupati dan wakil bupati?

Karena semua kandidat bupati beragama Islam, kita tidak bisa melihat apakah pemilih yang beragama Islam cenderung memilih calon yang beragama Islam, sebaliknya pemilih beragama Kristen cenderung memilih calon yang beragama Kristen. Meskipun demikian, ada fakta awal kecenderungan pemilih untuk memilih calon dengan agama sama. Kasus Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan pentingnya posisi "wakil bupati" terutama dalam menarik pemilih Kristen. Grafik 14 menunjukkan hal tersebut. Kandidat bupati yang menggandeng calon wakil bupati beragama Kristen mendapat dukungan lebih banyak di wilayah Kristen. Misalnya kandidat Syamsuddin Mokoginta. Kandidat ini hanya mendapat 4.4% suara saja di kalangan pemilih Islam. Tetapi di kalangan pemilih Kristen, ia mendapat suara 24.5%. Banyaknya pemilih Kristen

yang mendukung Syamsuddin Mokoginta kemungkinan tidak bisa dilepaskan dari pasangan wakil bupati yang digandeng, yakni Suryono Wijoyo yang kebetulan adalah beragama Kristen.

Fakta ini makin terlihat jika dibandingkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bulan September 2005 dan Februari 2006. Di bulan September, ketika pasangan calon belum terbentuk, Syamsudin Mokoginta hanya mendapat 1.4% suara saja di kalangan pemilih Kristen. Tetapi ketika ia menggandeng Suryono Wijoyo, dukungan di kalangan pemilih Kristen naik menjadi 24.5% (Lihat Grafik 15). Di luar fakta ini, baik di kalangan Islam maupun Kristen, Marlina Moha Siahaan mendapat dukungan kuat yang akhirnya menghantarkannya sebagai bupati Bollang Mongondow.



**Grafik 15: Trend Preferensi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Menurut Agama Pemilih**

Keterangan: Data diolah dari survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan September 2005 dan Februari 2006 di Kabupaten Bolaang Mongondow. Semua survei dilakukan dengan menggunakan metode penarikan sampel yang sama, yakni *Multistage Random Sampling*. Populasi survei adalah semua pemilih di Kabupaten Bolaang Mongondow. Jumlah sampel untuk semua survei (September 2005 dan Februari 2006) sebanyak 440 responden (dengan sampling error plus minus 4.8% pada tingkat kepercayaan 95%). Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face interview*). Di luar kesalahan dalam penarikan sampel, dimungkinkan adanya kesalahan non sampling.

Sumber: Survei LSI (September 2005 dan Februari 2006)

Q: Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow akan dilakukan Maret ini. Ada empat pasangan bupati dan wakil bupati yang akan maju dalam pemilihan. Dari empat pasangan bupati dan wakil bupati ini, mana yang akan Ibu/ Bapak pilih? (Februari 2006);  
Q: Seandainya pemilihan langsung Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan pada hari ini Ada 7 kandidat Bupati yang akan maju, siapa yang akan ibu/bapak pilih dari calon-calon berikut? (September 2005).

## Kesimpulan

Tulisan ini hanya studi kecil dan awal untuk melihat kaitan antara agama dengan perilaku pemilih. Perlu ada penelitian lebih lanjut untuk melihat kaitan antara agama dengan perilaku pemilih itu secara lebih dalam. Dari ketiga kasus Pilkada (Kota Ambon, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow) tampak adanya pola dan peran yang berbeda. Di Kota Ambon, agama tampak tidak memainkan peran dalam preferensi pemilih. Dalam arti pemilih yang beragama Islam tidak lantas lebih condong untuk memilih kandidat yang beragama Islam, dan demikian juga sebaliknya. Sementara di Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow, latar belakang agama kandidat tampak mempengaruhi preferensi pemilih. Di kalangan pemilih Islam misalnya, lebih cenderung memilih pasangan kandidat di mana terdapat calon yang beragama Islam. Kasus ini terjadi dalam Pilkada Kota Manado. Atau sebaliknya, di kalangan pemilih Kristen lebih cenderung memilih pasangan kandidat dimana terdapat calon yang beragama Kristen. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow (**Eriyanto**).

## Daftar Pustaka

- Liddle, R. William dan Saiful Mujani, *The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy*, Laporan penelitian, 2003.
- , "Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik", Kompas, 1 September 2000.
- , *Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*, Laporan penelitian, 2007.
- Lingkaran Survei Indonesia, Laporan Pilkada Kota Ambon, Februari 2006
- , Laporan Pilkada Kota Ambon, Maret 2006
- , Laporan Pilkada Kota Ambon, Mei 2006
- , Laporan Pilkada Kota Manado, April 2005
- , Laporan Pilkada Kota Manado, Mei 2005
- , Laporan Pilkada Kota Manado, Juni 2005
- , Laporan Pilkada Kota Manado, Juli 2005
- , Laporan Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow, September 2005
- , Laporan Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow, Februari 2006
- Ranney, Austin, *Governing: An Introduction to Political Science*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc, 1999.

## Agama, Partai Politik dan Pemilih

**A**gama dalam kehidupan politik adalah topik yang selalu menarik untuk dipelajari. Perdebatan terus berkembang di kalangan ideolog (partai) politik, tokoh agama, dan para pemilih yang memiliki latarbelakang agama tertentu. Nilai-nilai agama hadir yang selalu dalam kehidupan privat dan publik tersebut dalam banyak hal dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Agama tampaknya terus dianggap penting dalam kontestasi politik. Pertama, bagi kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan dasar teologis, ideologis, solidaritas dan emosional.

Penggunaan asas Islam atau Partai yang didirikan atau didukung oleh kelompok-kelompok Islam tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Timur Tengah juga berlangsung kontestasi politik di mana adakalanya didominasi oleh partai-partai yang berasaskan agama. Partai yang menggunakan asas agama (Islam) nampak terus berkembang di Asia. Apakah *trend* adanya partai politik yang memiliki pendukung atau berazaskan agama hanya ada di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia? Fenomena ini ternyata tidak hanya berlangsung di kalangan negara-negara dengan mayoritas muslim. Di beberapa negara Barat yang telah lama menganut dan mengembangkan demokrasi juga nampak mengalami fenomena serupa. Agama tampak masih dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik. Hanya saja yang membedakan dengan negara-negara yang sistem demokrasinya baru berkembang, di negara-negara barat (terutama Amerika), faktor agama hadir dalam kehidupan publik dalam beberapa turunan isu publik dan kebijakan.

DALAM sebuah diskusi dengan tema "Prospek Islam Politik" di Hotel Nikko, Jakarta tanggal 15 Oktober 2006 lalu, pengamat Politik Islam Institut Agama Islam Negeri, Bachtiar Effendy berpendapat bahwa Partai Islam diyakini tidak akan menjadi pemenang pemilihan umum. Perolehan terbanyak partai ini dalam sejarah hanya 42.5 persen pada Pemilu 1955. Menurut Bachtiar Effendy, ada kecenderungan dimana wilayah politik partai Islam terbatas. Partai Islam kerap membawa isu-isu lama, seperti penerapan syariat, pembentukan negara Islam, dan presiden beragama Islam<sup>1</sup>.

Apa yang disampaikan oleh Bachtiar Effendy ini tentu bertolak belakang dengan asumsi yang selama ini diyakini oleh kalangan politisi partai Islam dan tokoh Islam. Sebab, pada arena kontestasi Pemilu Presiden dan Pilkada, agama Islam seringkali juga diasumsikan memiliki pengaruh yang sangat besar. Fenomena politik semacam terutama muncul dari pola berfikir para elit agama dimana masing-masing pendukung organisasi keagamaan dengan sendirinya akan berfikir secara linear dan serta merta memberikan dukungan dalam pemilihan.

Pada Pemilu Presiden 2004 misalnya, kita dapat melihat bagaimana elit agama nampak meyakini logika semacam ini. Beberapa elit agama yang ikut dalam Pemilu Presiden

1 "Hasil Survei: Partai Islam Tak Akan Menang Pemilu", *Tempo Interaktif*, 15 Oktober 2006

2004 lalu misalnya, K.H. Hasyim Muzadi (NU) berpasangan dengan Capres Megawati. Hamzah Haz (PPP-NU) berpasangan dengan Agum Gumelar. K.H. Sholahuddin Wahid (NU) berpasangan dengan Capres Wiranto. Pada pemilu tersebut, nampak tidak satupun pasangan Capres-Cawapres dari elit ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang keluar sebagai pemenang dalam Pemilu Presiden 2004.

Hal yang sama juga dapat dijumpai dalam arena Pilkada, fenomena menguatnya kalangan elit agama untuk maju dalam bursa Pilkada juga sangat besar<sup>2</sup>. Masing-masing kandidat yang diusung partai nampak memiliki *track record* dalam kepemimpinan organisasi agama tertentu, misalnya dari kalangan NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. Di sini juga berkembang sejumlah fenomena politik dimana keberadaan ormas keagamaan—seperti NU dan Muhammadiyah—dianggap terus menerus ada dalam tarikan atau dapat menjadi perangkat politik (*political tools*) kepentingan partai politik (PPP, PAN, PKB, PKS dan PBR) dan kandidat yang dicalonkan oleh masing-masing partai politik atau koalisi partai politik.

Beberapa hasil Pilkada di sejumlah daerah bahkan dianggap sempat membuat keheranan bagi sejumlah elit ormas keagamaan. Di daerah-daerah kabupaten/kota yang dihuni oleh mayoritas beragama Islam, muncul sejumlah kompetisi antar kelompok keagamaan. Hal ini dapat kita saksikan di beberapa daerah yang berbasis NU misalnya, justru dimenangkan oleh kandidat yang didukung oleh PAN—diasumsikan secara otomatis Muhammadiyah<sup>3</sup>. Konfigurasi persaingan kandidat juga berkembang di beberapa daerah yang memiliki penduduk dengan agama yang berbeda. Selama beberapa tahun Pilkada, di sejumlah daerah Kabupaten yang mayoritas beragama Kristen/Katolik, namun dalam arena Pilkada, kandidat yang menang berasal dari kalangan Islam. Dan juga fenomena sebaliknya.

Dari kecenderungan fenomena politik lokal dan nasional di Indonesia saat ini, agama tampaknya terus dianggap penting dalam kontestasi politik. Pertama, bagi kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik

dari pemilih atas dasar kesamaan dasar teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Dalam kadar tertentu, pada sejumlah kelompok pemilih, bisa jadi program-program, kebijakan, kinerja dan prestasi partai politik agama bagi kehidupan publik tidak menjadi hal yang terlalu penting. Namun yang terpenting adalah asas dasar perjuangan partai politik tersebut tidak semata-mata untuk tujuan politik profan (dunia), namun lebih pada aspek transendental dan sakral (akhirat).

Kedua, bagi para kandidat (dalam Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada), agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar beragam relasi sosial, kultural dan politik. Bisa jadi di dalamnya terdapat relasi hubungan santri-kyai (guru/ustad), relasi keluarga, relasi jaringan pendidikan, relasi pertemanan, relasi kedaerahan, relasi kesukuan, relasi ekonomi dan berbagai jenis relasi lainnya yang selalu lekat dalam kehidupan dan interaksi keagamaan.

Kedua hal di atas saat ini nampak masih terus menjadi perdebatan yang menarik. Dalam hal ini, pada konteks sosiologis, psikologis dan antropologis seperti apa agama dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi partai politik dan kandidat. Serta sebaliknya, pada konteks sosiologis, psikologis dan antropologis seperti apa agama dapat menjadi daya tarik yang lemah bagi partai politik dan kandidat.

Th. Sumartana berpendapat bahwa keberadaan agama di Indonesia nampak masih menjadi sentrum dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, cara berfikir masyarakat di Indonesia dalam memandang realitas politik dalam banyak hal dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Bahkan adakalanya politisi dinilai perlu mendapatkan legitimasi institusi keagamaan. Kondisi ini kadangkala menjadikan para politisi untuk berebut legitimasi dihadapan lembaga-lembaga keagamaan<sup>4</sup>.

Berbeda dengan Th. Sumartana, Harold Crouch pernah memberikan kesimpulan pesimis adanya kebangkitan politik Islam di Indonesia. Sebab, yang terjadi hanyalah semata-mata kebangkitan kelompok-kelompok politik Islam. Kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok-kelompok

2 Analisis yang membahas tentang dinamika elit agama dalam Pilkada di Propinsi DIY misalnya lihat dalam Bambang Purwoko, "Perilaku Elit Agama Dalam Dinamika Politik Lokal", *Kedaulatan Rakyat*, 31 Agustus 2006.

3 Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Pilkada Jombang.

4 Lihat Th. Sumartana, "Measuring The Significance of Religious Political Parties and Pluralist Parties in the 1999 General Election in Indonesia", *Inter-Religio*, 36, Winter, 1999.

Islam sebagai entitas sosiologis dalam masyarakat. Bukan lagi sebagai entitas idiologis<sup>5</sup>. Dari sini barangkali ikut menjelaskan mengapa dukungan terhadap partai Islam di Indonesia sejak Pemilu 1999 hingga 2004 tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Demikian juga dalam berbagai arena Pilkada, kandidat yang dicalonkan oleh Partai Islam tidak secara masif sepenuhnya mendapatkan dukungan pemilih yang mayoritas beragama Islam.

### Fenomena Partai dan Politik Islam di Asia

Fenomena agama dan politik di Asia tampak menjadi fenomena yang menarik banyak perhatian pengamat dan praktisi. Penggunaan asas Islam atau partai yang didirikan atau didukung oleh kelompok-kelompok Islam tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Timur Tengah juga berlangsung konstestasi politik di mana adakalanya didominasi oleh partai-partai yang berasaskan agama.

Partai yang menggunakan asas agama (Islam) tampak terus berkembang di Asia. Perkembangan pesat misalnya dapat kita simak di Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan tempat tinggal bagi sepertiga penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Komunitas masyarakat Islam yang lebih kecil bisa ditemukan di Burma (Myanmar), Singapura, Filipina, dan Thailand.

Lokasi strategis Asia Tenggara yang berada dalam lingkungan yang dianggap memiliki sejumlah keunggulan geo-strategis. Dalam perspektif ekonomi-politik, Asia Tenggara berada di antara lahan minyak kritis Timur Tengah dan Asia Timur yang haus energi, bersamaan dengan lahirnya kelompo-kelompok Islam radikal di Timur Tengah dan Asia Selatan selama kurun 1990-an. Bahkan disinyalir kalangan radikal tampaknya semakin menguat pada negara-negara seperti Indonesia dan Filipina. Hal ini kemudian menjadikan Islam di Asia Tenggara sebagai salah isu internasional<sup>6</sup>.

Di Malaysia, partai Islam pasca Pemilu Malaysia (Pilihan Raya) ke-12 Maret 2008, tampak terus mendapatkan

dukungan kuat. Representasi Partai Islam terbesar di Malaysia adalah PAS. Partai Islam Se-Malaysia (bahasa Melayu: *Parti Islam Se-Malaysia*/ PAS) adalah sebuah partai politik yang sangat diperhitungkan di pentas politik Malaysia. Partai ini menjadikan Islam sebagai cara hidup dan bertujuannya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. PAS memperjuangkan kedaulatan Islam dan meletakkan Islam sebagai faksi pemerintahan. Presiden partai PAS sekarang adalah Abdul Hadi Awang, merupakan salah seorang wakil dewan dari negara bagian Terengganu. Wakil presidennya ialah seorang ulama profesional yaitu Nasharudin Mat Isa. Di antara anggota penting lainnya adalah Husam Musa, Muhammad Sabu dan Dr. Hassan Ali. Walaupun PAS adalah sebuah partai yang menyokong Islam, namun, di Malaysia, PAS dianggap sebagai oposisi (bahasa Melayu: Pembangkang). PAS mempunyai satu koran resmi, yaitu *Harakah*<sup>7</sup>.

PAS merupakan salah satu bagian dari koalisi Barisan Alternatif (BA). Kelompok ini merupakan gabungan koalisi partai-partai politik yang melakukan kebijakan oposisi terhadap Barisan Nasional (BN). Di tengah pemerintahan yang cukup otoriter dan dalam bayangan Pemilu yang dipenuhi kecurangan, dukungan pemilih terhadap PAS cenderung menguat. Dalam Pemilu tersebut PAS mendapatkan 32 kursi di parlemen dan 75 di kursi DUN (DPRD).

5 Lihat Harold Crouch, "The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia", dalam Harold Crouch (Eds), *Islam in Southeast Asia: The Recent Development*, Singapore, ISEAS, Working Paper, No.1, Januari 2002

6 Scott B McDonald dan Jonathan Lemco, Islam Politik di Asia Tenggara, dalam <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01661.html>.

7 Partai Islam Se-Malaysia, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Islam\\_Se-Malaysia](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Islam_Se-Malaysia). Lihat juga, Siri Sejarah Perjuangan PAS, dalam [http://www.angelfire.com/wa2/wabillah/pasbab1\\_2.htm](http://www.angelfire.com/wa2/wabillah/pasbab1_2.htm)

**Tabel 1: Perolehan Suara Partai Dalam Pemilu Malaysia**

| No            | Partai                                 | Perolehan Kursi Parlemen |    |
|---------------|--|--------------------------|----|
| 1.            | Barisan Nasional/BN(UMNO, MCA dan MIC) | 137                      |    |
| 2             | BA (Barisan Alternatif)                | PAS                      | 23 |
|               |  | KeADILan                 | 31 |
|               |  | DAP                      | 28 |
|               |  | Total BA                 | 82 |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>222</b>               |    |

Sumber : Suruhan Jaya Pilihan Raya. Maret, 2008.

| No  | Negeri                            | Perolehan Kursi Partai di DUN (Setingkat DPRD) |     |          |     |       |
|-----|-----------------------------------|--|-----|----------|-----|-------|
|     |                                   | BN   | PAS | KeADILan | DAP | Bebas |
| 1.  | Dun Perlis (Jumlah Kursi 15)      | 14   | 1   | -        | -   | -     |
| 2.  | Kedah (Jumlah Kursi 36)           | 14   | 16  | 4        | 1   | 1     |
| 3.  | Kelantan (Jumlah Kursi 45)        | 6  | 38  | 1        | -   | -     |
| 4.  | Terengganu (Jumlah Kursi 32)      | 24   | 8   | -        | -   | -     |
| 5.  | Pulau Pinang (Jumlah Kursi 40)    | 11   | 1   | 19       | 9   | -     |
| 6.  | Perak (Jumlah Kursi 59)           | 28   | 6   | 18       | 7   | -     |
| 7.  | Pahang (Jumlah Kursi 42)          | 37   | 2   |          | 2   | 1     |
| 8.  | Negeri Sembilan (Jumlah Kursi 36) | 21   | 1   | 4        | 10  | -     |
| 9.  | Melaka (Jumlah Kursi 28)          | 23   | -   | -        | 5   | -     |
| 10. | Johor (Jumlah Kursi 56)           | 50   | 2   | 4        | -   | -     |
| 11. | <b>Jumlah</b>                     |  |     |          |     |       |

Sumber: Suruhan Jaya Pilihan Raya. Maret, 2008. Data Sabah dan Sarawak Belum Ditampilkan

Dari pemaparan di atas, PAS dalam Pemilu Malaysia yang ke-12 memperoleh kursi di DUN/DPRD dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan di dua negara bagian, yaitu Kedah dan Kelantan, PAS mampu mendominasi perolehan kursi. Jika dihitung dengan partai-partai lain, dalam Barisan Alternatif(BA), kelompok ini tampak mampu mendominasi di empat negara bagian, yaitu Kedah, Kelantan, Pulau Pinang dan Perak. Kemenangan ini menjadikan kelompok ini secara otomatis mendominasi penentuan Menteri Besar (Gubernur) di keempat negara bagian tersebut. Kemenangan PAS ini—meskipun memiliki asas Islam—dalam banyak hal mendapatkan dukungan kelompok etnis dan agama lainnya di beberapa negara Bagian. sebut saja yang terjadi di Negara Bagian Johor<sup>8</sup>.

Selain di Malaysia, fluktuasi kekuatan politik agama (Islam) terhadap Negara juga berlangsung di Pakistan. Sejak awal pendiriannya pada 1947 hubungan yang pasti antara agama, dalam hal ini Islam, dan negara nampak sudah menjadi *concern* politik dan diperdebatkan. Perdebatan tersebut tampak semakin melebarkan jurang pemisah antara mereka yang menganggap eksistensi

Pakistan diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak politik dan ekonomi kaum Muslim dan mereka yang melihat keberadaannya di dunia sebagai satu negara keagamaan, yaitu Islam.

Dua dasawarsa awal pembentukan Negara, politik agama (Islam) jarang mencampuri urusan dan kebijakan Negara. Bahkan selama lima puluh tahun terakhir, publik Pakistan juga selalu menolak partai-partai politik Islam di dalam setiap pemilihan umum. Dua dasawarsa terakhir mencatat kenaikan yang sangat signifikan dari kekuatan Islam ortodoks. Seiring dengan ini, kekerasan dan intoleransi komunal bermunculan. Daoed Joesoef berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang turut menggerakkan kecenderungan menguatnya politik Islam (konservatif/ ortodoks) di Pakistan.

Pertama, naiknya tokoh militer konservatif, Jenderal Zia-ul-Haq, di akhir 1970. Selama pemerintahannya (1977-1988) negara berperan aktif dalam mendukung gerakan Islam konservatif dan nilai-nilai ortodoksnnya melalui dukungannya pada pendirian madrasah. Lembaga pendidikan agama ini lalu dimanfaatkan oleh kelompok konservatif untuk mendorong gerakan militan tidak hanya di Pakistan, tetapi juga di negeri-negeri lain. Di samping

<sup>8</sup> Lihat "Pas Johor terimasonokongan Cina, India," dalam [http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0318&pub=Utusan\\_Malaysia&sec=Politik&pg=po\\_10.htm](http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0318&pub=Utusan_Malaysia&sec=Politik&pg=po_10.htm)

ini pemerintah mengadakan perubahan dalam *electoral laws* untuk mencegah minoritas non-Islam berpartisipasi secara terbuka dalam pemilihan umum dan mengurangi hak-hak perempuan dan golongan minoritas.

Kedua, fenomena politik dan revolusi Islam di Iran. Dengan berjalannya waktu, kondisi ini menimbulkan ketegangan baru di antara penganut Sunni dan Syiah, yang sebelumnya memang saling bermusuhan, di Pakistan. Arus bebas persenjataan dari peperangan di Afghanistan dan pendanaan dari ortodoksi revolusioner Iran serta rezim-rezim konservatif dari wilayah Teluk bagi masing-masing "langganannya" di Pakistan semakin menyulut kekerasan sektarian yang terorganisasi.

Ketiga, munculnya kaum Mujahidin di Afghanistan. Apa yang dilakukan Mujahidin dalam peperangan di negeri tetangga diikuti dengan seksama oleh kelompok konservatif di Pakistan. Mereka lalu turut berperan aktif dalam konflik bersenjata itu dan berupaya "men-Taliban-kan" Pakistan dan negeri-negeri berpenduduk Muslim di

kontestasi politik nasional. Salah satu contohnya adalah

Turki. Negara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat.

Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan Dinasti Usmani. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di wilayah Persia, berkembang di wilayah kekuasaan Kekhalifahan Turki dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Perkembangan selanjutnya memperlihatkan pengaruh yang kuat kedua peradaban tersebut ke dalam kebudayaan bangsa Turki. Kondisi ini menimbulkan kekeliruan pada masyarakat awam yang sering menganggap bahwa bangsa Turki sama dengan bangsa Arab. Suatu anggapan yang keliru yang selalu ingin diluruskan oleh bangsa Turki sejak tumbuhnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke Barat telah menyerap

**Tabel 2: Hasil Pemilu Parlemen Turki Tahun 2007**

| No     | Partai                              | Persentasi Popular Vote | Jumlah Kursi |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1.     | Justice and Development Party (AKP) | 46,7 %                  | 341          |
| 2.     | Republican People's Party (CHP)     | 20,8 %                  | 112          |
| 3.     | Nationalist Movement Party (MHP)    | 14,3 %                  | 71           |
| 4.     | Democratic Party (DP)               | 5,4 %                   | 0            |
| 5.     | Independents                        | 5,2 %                   | 26           |
| 6.     | Others                              | 7,6 %                   | 0            |
| Jumlah |                                     | 100 %                   | 550.         |

Sumber: Zeyno Baran, "Turkey Divided", *Journal of Democracy*, Vol. 19, No. 1. Januari, 2008, hal. 4

Asia Tenggara melalui *training* di madrasah-madrasah yang mereka kelola.

Keempat, peningkatan nasionalisme Hindu di India. Penghancuran Masjid Babri di Kota Ayodhya di India Utara (1992), karena dipercaya sebagai tempat kelahiran Dewa Ram, menggerakkan serangan balasan dari Muslim fanatik terhadap berbagai kuil Hindu di Pakistan. Kelompok fanatik ini menggunakan insiden tersebut sebagai kesempatan untuk mengobarkan militansi keislaman di kalangan penduduk<sup>9</sup>.

Selain di Pakistan, di kawasan Asia yang berbatasan dengan Eropa, partai Islam juga berkembang dalam

unsur-unsur budaya Barat yang dianggap modern. Campuran peradaban Turki, Islam dan Barat, inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat Turki<sup>10</sup>.

Hingga saat ini di Turki, *Justice and Development Party* atau Partai Pembangunan Keadilan (AKP) yang berideologi Islam berhasil menyisihkan pesaing-pesaingnya dalam pemilihan umum Parlemen Turki. Partai pendukung Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan ini menang agregat 46,7% atau memperoleh 341 dari 550 kursi di parlemen (*Grand National Assembly*) dari partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP). Partai Rakyat Republik mendapat

9 Daoud Joesoef, "Kemelut Politik di Pakistan", *Suara Pembaruan*, 30 Oktober 2007

10 Ade Solihat, "Kemalisme, Budaya dan Negara Turki", Makalah disampaikan dalam Ceramah Umum KEMALISME: Budaya dan Negara Turki, Departemen Linguistik dan Departemen Susastra FIB UI, 10 Mei 2005

dukungan suara 20,3% dan memperoleh 111 kursi<sup>11</sup>.

Dari tabel di atas, AKP mendapatkan perolehan 62% kursi parlemen. Kemenangan AKP sepertinya membuktikan betapa besarnya keinginan warga Turki untuk mengubah ideologi mereka yang selama ini menganut sistem sekuler. Pengamat politik Turki Nur Rosiah melihat kemenangan AKP pada Pemilu Parlemen Turki tersebut tak lepas dari keinginan rakyat untuk kembali ke ideologi awal. Turki merupakan negara yang mengalami revolusi sistem dari kerajaan Islam ke republik yang sekuler.

Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan sistem politik, namun juga perubahan ideologis. Ketika menganut sistem republik, sekularisme pun berkuasa sehingga syariat Islam tidak diberi otoritas di ruang publik. Nur Rosiah berpendapat bahwa selama berada di Turki, kaum sekuler selalu beda pendapat dengan kelompok Islam. Ada kecenderungan di mana kaum sekuler menganggap kelompok Islam sebagai kaum yang ingin mengembalikan Turki ke bentuk lamanya (Kesultanan Utsmani) yang berhaluan Islam sehingga dianggap sebagai ancaman pemerintahan republik. Sementara dari kelompok Islam menganggap pemerintahan sekuler telah merampas hak mereka untuk menjadi muslim sebagaimana yang mereka yakini, seperti kebebasan untuk memakai simbol agama (Islam) seperti jilbab<sup>12</sup>.

11 Lebih Lanjut Lihat Zeyno Baran, "Turkey Divided", *Journal of Democracy*, Vol. 19, No. 1, January, 2008.

12 Turki menganut sistem sekuler sejak Jenderal Mustafa Kemal Atatürk berkuasa pada 1923, selepas kejatuhan Kesultanan Otoman akibat Perang Dunia I. Modernisasi (sekularisme) yang diusung Jenderal Mustafa Kemal Atatürk memang didukung sebagian besar rakyat Turki. Tapi, tidak sedikit pula yang menyayangkannya. Karena modernisasi yang dilakukan Bapak Bangsa Turki (Atatürk) dianggap terlalu radikal menggerus ideologi Islam. Misalnya, dengan melarang sufisme. Meski begitu, modernisasi ala Atatürk telah membawa perubahan dalam tatanan masyarakat Turki yang sebelumnya dianggap tabu. Pada 1934, wanita diberi hak pilih dalam pemilu. Sebelumnya, pada 1926 terjadi revolusi familial di mana wanita diberi hak lebih dalam tatanan keluarga dan poligami dilarang. Bahkan, pada 1935, sebanyak 18 perempuan duduk di parlemen. Tapi, perjalanan ideologi sekuler sebenarnya tidak semulus apa yang diharapkan Mustafa Kemal. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, setidaknya sudah terjadi tiga kali kudeta militer dengan alasan untuk menyelamatkan sekularisme (1960, 1970, dan 1980). Sepuluh tahun lalu, krisis politik juga terjadi setelah Partai Refah (Kesejahteraan) yang merupakan partai Islam pertama memenangkan pemilu Turki. Namun, militer berhasil memaksa PM Necmettin Erbakan yang berasal dari Partai Refah meletakkan jabatan. Militer pun akhirnya mengharamkan keberadaan Partai Refah dan melarang aktivitas politik Erbakan.

Banyak penilaian bahwa AKP bisa menghadirkan Islam dalam wajah yang berbeda dari apa yang dipahami masyarakat Turki selama ini. Maklum, kebanyakan rakyat Turki memandang Islam politik yang diwakili sejumlah partai Islam selama ini sebagai bentuk fundamentalis yang keras. Misalnya, melarang nuansa modernisasi. Ketika sekularisme diterapkan, religiusitas tetap hidup dalam masyarakat Turki dan muncul dalam beragam bentuk. Bahkan, selama proyek sekularisme, Pemerintah Turki selalu berhadapan dengan religiusitas tersebut. Islam pada akhirnya menjadi oposisi abadi bagi pemerintahan Turki yang sekuler.

AKP mengusung ideologi baru sebagai kubu demokrat konservatif dan berjanji berjalan berdampingan dengan sekularisme. Erdogan sendiri secara implisit sudah menegaskan untuk tetap komitmen dengan sistem sekuler Turki. Sesaat setelah Partai AKP dinyatakan menang, Erdogan langsung berikrar untuk melindungi sistem sekuler negara ini dan meneruskan program pembaharuan ekonomi dan politik<sup>13</sup>.

Dari kecenderungan yang berkembang di negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam, tampak ada dua hal yang menonjol. Pertama, di beberapa negara, seperti Indonesia, ideologi Islam dianggap terus memudar, karena menguatnya sekularisasi. Keberadaan Partai Islam dalam hal ini terus mengalami penurunan tingkat dukungan dalam berbagai arena pemilihan. Kedua, di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki misalnya, Partai Islam (berasaskan Islam), terus mengalami peningkatan dukungan dalam arena pemilihan. Keberadaan Partai Islam dianggap menjadi alternatif—baik dalam posisinya sebagai partai oposisi ataupun menjadi pemenang—yang diharapkan akan banyak memberikan harapan bagi perubahan tatanan politik yang lebih baik.

Apakah *trend* adanya partai politik yang memiliki pendukung atau berazaskan agama hanya ada di Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia? Fenomena ini ternyata tidak hanya berlangsung di kalangan negara-negara dengan mayoritas muslim. Di beberapa negara Barat yang telah lama menganut dan mengembangkan demokrasi juga tampak mengalami fenomena serupa. Agama masih dianggap menjadi

13 Thomas Pulangan, Sunu Hastoro dan Yani A, "Wajah Baru Gerakan Politik Islam, Dilema Sekuler", *Seputar Indonesia*, 29 Juli 2007

daya tarik kuat dalam preferensi politik. Hanya saja yang membedakan dengan negara-negara yang sistem demokrasinya baru berkembang, di negara-negara barat (terutama Amerika), faktor agama hadir dalam kehidupan publik dalam beberapa turunan isu publik dan kebijakan. Contoh misalnya tentang isu boleh tidaknya aborsi, pernikahan sesama jenis dan beberapa isu lainnya.

Di Amerika Serikat misalnya, agama cukup menentukan dalam arena kompetisi kandidat dan partai politik. Pada umumnya, masing-masing Partai di Amerika (Partai Demokrat dan Partai Republik) memiliki kecenderungan yang berbeda terhadap orientasi nilai-nilai keagamaan. Hal yang sama juga berlangsung pada kandidat senator dan presiden dari kedua partai tersebut. Partai Demokrat dalam hal ini dinilai cenderung lebih liberal dalam mengintrepretasikan isu-isu publik dan kebijakan publik terhadap nilai-nilai keagamaan. Hal ini berbeda dengan Partai Republik yang cenderung konservatif.

Ada beberapa contoh yang dapat disimak di sini. Pertama, agama cukup menentukan dalam arena kompetisi pemilihan presiden antara G.W Bush Jr Vs Kerry. Berdasarkan National Election Pool (2004), Bush (51,5%) mendapatkan dukungan yang lebih besar dari para penganut Protestan dan Katolik dibandingkan Kerry (48,5 %).

Hal serupa juga berlangsung pada pemilu presiden tahun 2000. Berdasarkan data *exit poll* Vote News

Service, kalangan protestan sebagian besar memberikan dukungannya kepada Bush (56 %) dibandingkan dengan Al Gore (42 %). Sedangkan kalangan Katolik sebagian besar memberikan dukungannya kepada Al Gore (50 %) dibandingkan dengan Bush (47 %). Dalam pemilu 2000 tersebut, dukungan terhadap Bush dan AL Gore seimbang (sebesar 48 %).

Kedua, agama nampak cukup menentukan dalam arena kompetisi pemilihan presiden antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Berdasarkan National Election Pool (2004) dan Pew Research Center Survey (2005) menunjukkan bahwa Partai Republik mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kalangan *evangelical protestant, cristians, white catholic* dan *white mainline protestant* dibandingkan dengan Partai Demokrat. Riset yang dilakukan oleh Pew Research Center Survey (2005) menjadi contoh yang menarik untuk melihat bagaimana prosentasi pemilih Amerika dari kalangan White Evangelical Protestant dari tahun 1987-2004 antara 19-24 %, sedangkan pemilih dari keseluruhan White Protestants dari tahun 1987-2004 antara 41-51 %. Party ID di kalangan White Evangelical Protestants dari tahun 1987-2004 tampak terus mengalami fluktuasi. Mereka yang cenderung memilih Partai Demokrat nampak terus mengalami penurunan, yaitu dari 29 % pada tahun 1987, pada tahun 2004 menjadi 23 %. Adapun mereka yang cenderung memilih Partai Republik terus mengalami kenaikan, yaitu dari 34 % pada tahun 1987, menjadi 46 %

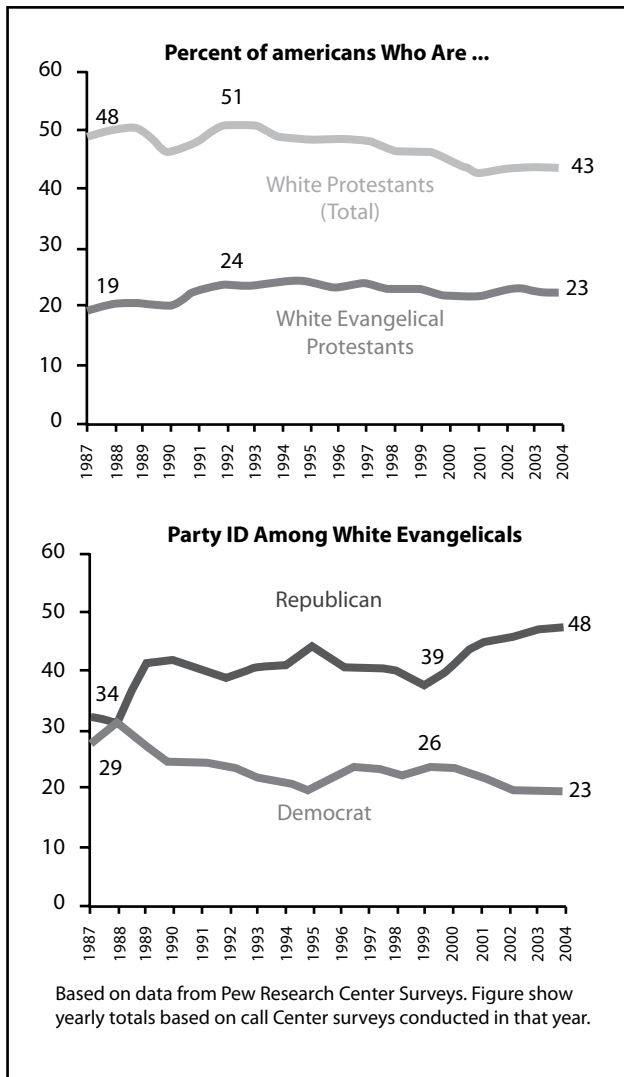
**Tabel 3: Kelompok-Kelompok Keagamaan dan Pemilihan Presiden Amerika 2004**

| No                  | Kelompok-Kelompok Keagamaan  | Bush          | Kerry         | Total        |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1.                  | Kalangan protestan evangelic berkulit putih yang tiap minggu hadir dalam ibadah mingguan di gereja (n=1.391) | 82,4 %        | 17,6 %        | 100 %        |
| 2.                  | Kalangan kelompok Kristen lainnya yang tiap minggu hadir dalam ibadah mingguan di gereja (n=420)             | 74,4 %        | 25,6 %        | 100 %        |
| 3.                  | Kalangan katolik berkulit putih yang tiap minggu hadir dalam ibadah mingguan di gereja (n=842)               | 61,8 %        | 38,2 %        | 100 %        |
| 4.                  | Kalangan katolik keturunan Amerika Latin (n=535)   | 37 %          | 63 %          |              |
| 5.                  | Kelompok keagamaan yang tidak memiliki afiliasi (n=1.361)  | 27,3 %        | 72,7 %        | 100 %        |
| 6.                  | Kalangan protestan yang berkulit hitam (n=725)   | 13,5 %        | 86,5 %        | 100 %        |
| 7.                  | Kelompok-kelompok keyakinan lainnya (n=512)  | 21,3 %        | 78,7 %        | 100 %        |
| 8.                  | Kelompok kristen lainnya (n = 251)   | 49,6 %        | 50,4 %        | 100 %        |
| 9.                  | Kelompok protestan evangelic kulit putih lainnya (n = 748)   | 71,7 %        | 28,3 %        | 100 %        |
| 10.                 | Kelompok katolik berkulit putih lainnya (n= 1.161)   | 53,2 %        | 46,8 %        | 100 %        |
| 11.                 | Kelompok white mainline protestant (n= 1.440)  | 52,5 %        | 47,5 %        | 100 %        |
| <b>Jumlah Total</b> |  | <b>51,5 %</b> | <b>48,5 %</b> | <b>100 %</b> |

Sumber: Pew Research Center, November 2007.

pada 2004.

Pew Research Center Survey (Oktober, 2007) juga mencatat bahwa institusi keagamaan seperti gereja, sinagog dan institusi-institusi keagamaan lainnya di Amerika memiliki kekuatan positif di dalam menyelesaikan



Sumber : Pew Research Center Survey (Oktober, 2007)

berbagai persoalan masyarakat. Kendati demikian publik dalam hal ini juga memiliki sikap ambivalen dalam kaitannya agama dan politik.

Pew Research Center Survey (Oktober, 2007) juga mencatat bagaimana faktor agama berpengaruh terhadap preferensi pilihan terhadap para kandidat calon presiden di Amerika. Giuliani yang dicalonkan oleh Partai Demokrat misalnya mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kalangan *white evangelical protestant, other christians, non-*

*latino catholic* dan *white mainline protestant* dibandingkan dengan Hilary Clinton.

Selain itu, Pew Research Center Survey (Agustus, 2007) juga mencatat bahwa kalangan pemilih dari kalangan *while evangelical protestant, other christians, non-latino catholic* dan *white mainline protestant* lebih cenderung menyukai kandidat presiden yang memiliki latarbelakang kepercayaan agama yang kuat dibandingkan dengan yang tidak memiliki latar belakang kepercayaan agama yang kuat. Namun para pemilih dari kalangan *while evangelical protestant, other christians, non-latino catholic* dan *white mainline protestant* tampak lebih besar yang menjawab tidak setuju terhadap para kandidat yang membicarakan agama mereka.

### Agama dan Partai Politik di Indonesia

Pada masa Orde Lama, beberapa partai yang mengikuti pemilu 1955 memiliki pendukung—atau bahkan berazaskan—kelompok keagamaan tertentu. Salah satu partai Islam yang memiliki dukungan terbesar pada masa Orde Lama adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sedangkan keseluruhan partai-partai yang berazaskan (atau mendapatkan dukungan umat) Islam pada Pemilu 1955 mencapai sekitar 45 % dari total suara.

Masyumi telah menjadi partai penting pada era Demokrasi Parleментар tahun 1950-an. Partai yang dibentuk pemerintahan militer Jepang tahun 1943 (John L Esposito, 2000) sering kali menjadi inspirasi penggabungan kelompok politik Islam Indonesia saat ini. Pada awal pendiriannya, Masyumi dianggap sebagai organisasi partai politik yang menjadi payung penting bagi organisasi Islam di Indonesia. Perkembangan berikutnya, Masyumi melemah karena keabsahan pimpinannya dipertanyakan. Pimpinan Masyumi lebih banyak diambil dari kaum cendekiawan yang mampu berbahasa Belanda dan mengenyam pendidikan barat. Kondisi ini membuat ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) terpinggirkan. Persaingan ini terus memuncak hingga akhirnya NU menyatakan keluar dari Masyumi tahun 1952 dan berakibat pengurangan suara pada Pemilu 1955<sup>14</sup>.

Masa Orde Lama menjelang Pemilu 1955, partai-partai berbasiskan atau berazaskan agama terus bersaing. Dua dari partai Islam yang terbesar adalah Masyumi dan NU.

<sup>14</sup> Imam Prihadiyoko, "Keinginan PPP Ingin Jadi Rumah Politik Umat Islam?" *Kompas*, 26 Januari 2007.

Sebelumnya, NU bergabung dengan Masyumi. Namun karena adanya beberapa konflik internal, NU kemudian menyatakan keluar dari Masyumi. Pemilu 1955 dengan hasil Masyumi 20,9 persen, dan NU yang mendapat dukungan 18,4 persen dari pemilih. Selama Sebagai contoh Partai NU.

Naiknya Soeharto setelah Soekarno diturunkan pada tahun 1967 pada awalnya membangkitkan semangat mantan pemimpin Masyumi mendirikan lagi partai payung itu. Akhirnya mereka mendirikan Partai Muslimin Indonesia di Malang tahun 1968 dengan mengangkat tokoh senior Masyumi, Mohamad Roem, sebagai ketua. Soeharto tidak merestui. Partai ini akhirnya kandas, tetapi tetap melanjutkan ide besar Masyumi dalam Dewan Dakwah Islam Indonesia.

Pada masa Orde Baru, partai politik yang memiliki pendukung dari kelompok-kelompok keagamaan tertentu ini dipaksakan fusi. Tidak hanya itu, semua partai politik juga wajib berazaskan Pancasila. Restrukturisasi sistem kepartaian Soeharto tahun 1973 hanya mengakui satu partai Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Soeharto memaksa empat partai politik Islam berfusi, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Menjelang Pemilu 1977, PPP berhasil memobilisasi sentimen keislaman dengan memakai lambang Kabah. Hasilnya, PPP memperoleh 29 persen suara di tingkat nasional dan mendapat suara tertinggi di Jakarta.

Pada Pemilu 1982, PPP mendapat 28 persen suara. Posisi seperti ini membuat pemerintahan Orde Baru khawatir, kemudian memaksa semua ormas dan partai menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan termasuk juga pemakaian simbol. PPP kemudian mengubah lambangnya menjadi bintang. Dukungan pada PPP berkurang karena NU mempertanyakan keabsahan kepemimpinan partai dan alokasi kursi di parlemen. Kekecewaan ini membuat NU menarik dukungan dari PPP. Menjelang Pemilu 1987, NU aktif melakukan kampanye penggembosan PPP. Tidak heran jika suara PPP turun secara signifikan hingga tersisa 16 persen dari total suara. Pada Pemilu 1992, suara PPP di bawah kepemimpinan Ismail Hasan Metareum meningkat jadi 17 persen.

Meskipun dukungan terhadap partai Islam melemah, keislaman mulai mewarnai kehidupan birokrasi dan masyarakat (John L Esposito, 2000). Intensitas kegiatan

keagamaan meningkat mulai tahun 1990-an. Partai Golkar yang menjadi partai pemerintah lebih Islami dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan kemudian tokoh Golkar dan mantan Masyumi di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mendirikan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Menjelang Pemilu 1997, PPP menawarkan wacana Mega-Bintang untuk menarik simpati pendukung Megawati Soekarnoputri yang kecewa dengan kepemimpinan Soerjadi di PDI. Ketika reformasi bergulir tahun 1998, PPP berhasil membawa sejumlah intelektual Islam bergabung dan mampu mempertahankan eksistensinya. Bahkan tetap masuk dalam jajaran partai politik besar.

Bila menelusuri lebih dalam lagi, hubungan tersebut setidaknya bisa kita masukkan ke dalam tiga fase. Fase pertama adalah fase di mana Soeharto mulai mengawali langkahnya melakukan depolitisasi Islam. Ini terjadi di awal-awal kekuasaannya hingga pertengahan 70-an. Fase kedua adalah fase di mana dia kian kuat mencengkeramkan kukunya untuk memandulkan politik Islam hingga pertengahan 80-an, yang ditandai dengan pemaksaan azas tunggal Pancasila ke seluruh bidang kehidupan termasuk politik. Sedangkan fase ketiga adalah fase di mana arsitek Orde Baru ini mulai memberi tempat dan mengakomodasi politik Islam dengan merestui kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai cikal-bakalnya, di awal 90-an<sup>15</sup>.

Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan yang digenggamnya selama 32 tahun pada 21 Mei 1998 silam, memberi angin segarbagi kehidupan politik Islam (gerakan politik berideologi Islam) di Indonesia. Setelah dimarginalkan selama rezim Orde Baru yang militeris-birokratik-sekuler, politik Islam kembali bergeliat. Puluhan partai politik berazaskan Islam pun lahir di awal era Reformasi itu. Termasuk di dalamnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali ke "khittah" menggunakan azas Islam, setelah sejak 1982 dipaksa oleh Soeharto untuk menerima azas tunggal Pancasila.

Kemudian pasca reformasi, partai-partai politik yang memiliki pendukung dari kelompok-kelompok keagamaan atau bahkan berazaskan agama kembali berdiri. Kontestasi dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004 nampak diikuti

15 "Episode Soeharto dan Politik Islam", *Republika*, 29 Januari 2008.

oleh sejumlah partai politik yang memiliki latarbelakang pendukung kelompok keagamaan atau bahkan berazaskan agama.

Menguatnya *trend* pendirian partai politik yang berasaskan agama atau didukung oleh kelompok-kelompok keagamaan ini menunjukkan bahwa banyak kalangan elit politik yang meyakini bahwa agama memiliki pengaruh penting dalam preferensi politik.

Dari 24 partai peserta pemilu, 16 partai menyebut Pancasila atau Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas. Partai-partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai lainnya adalah Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Serikat Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor, Partai Merdeka, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Daerah.

Sedangkan partai yang berasas Marhaenisme Bung Karno tercatat hanya Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Berbeda dengan partai lainnya, Partai Indonesia Baru meletakkan keadilan, demokrasi, kemajemukan, dan Pancasila sebagai asas. Lima partai yang menyebutkan Islam sebagai asas adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Selain asas yang secara tegas dicantumkan dalam setiap AD/ ART partai, terdapat sejumlah partai berasaskan Pancasila tetapi memiliki nuansa keagamaan seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang kelahirannya dibidani 20 pendeta Kristen. Sedangkan partai bernuansa Islam yang mencantumkan Pancasila sebagai asas adalah PKB, PAN, dan Partai Serikat Indonesia. Berkurangnya jumlah partai berasas Islam dalam Pemilu 2004 tidak dapat diartikan munculnya pengkristalan kekuatan Islam dalam lima partai peserta Pemilu 2004. Hal ini dapat dilihat dari partai-partai Islam yang menjadi peserta pemilu<sup>16</sup>.

Demikian halnya dengan Partai bernuansa Kristen dan Katolik yang pada Pemilu 1999 terdapat Partai Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Katolik Demokrat, Partai Cinta Damai, ternyata tidak mampu bertahan sampai Pemilu 2004. Pergeseran ini seharusnya dapat dilihat sebagai kesadaran bahwa urusan agama menjadi wilayah yang terpisah dari urusan negara. Dengan kata lain, urusan negara yang diawali dari pertarungan partai-partai politik bukanlah urusan kelompok agama-agama tertentu

Jumlah partai Islam yang ikut dalam Pemilu 2004 berkurang secara drastis dibandingkan dengan Pemilu 1999. Menciutnya jumlah partai Islam pada Pemilu 2004 merupakan fenomena baru setelah euforia umat Islam mendirikan partai pada Pemilu 1999. Saat itu ada 11 partai Islam yang ikut menjadi peserta pemilu: PPP, PBB, PKU, PK, PNU, Partai SUNI, Masyumi Baru, PPIM, PUI, PSII, dan PSII 1905. Berarti, ada penurunan yang cukup signifikan dari partai-partai Islam yang terlibat dalam Pemilu 2004.

Mengapa terjadi penciutan jumlah partai-partai Islam pada Pemilu 2004? Ada dua alasan yang bisa menggambarkan menciutnya jumlah partai Islam pada pemilu ini<sup>17</sup>. Pertama, secara prosedural, keikutsertaan partai-partai peserta pemilu harus lolos verifikasi secara administratif dan verifikasi faktual di 21 provinsi. Akibatnya, hampir semua partai baru, termasuk partai-partai Islam, kesulitan memenuhi jumlah minimal verifikasi faktual. Menciutnya jumlah partai-partai Islam pada Pemilu 2004 akibat masalah prosedural sehingga hanya bisa menambah tiga partai yang semuanya merupakan reinkarnasi partai Islam pada Pemilu 1999 atau pecahan dari partai yang sudah mapan. PKS dan PPNUI adalah reinkarnasi dari PK dan PNU, PBR adalah pecahan PPP, sedangkan PBB dan PPP adalah partai peserta pemilu yang lolos secara otomatis karena melebihi *electoral threshold* pada Pemilu 1999.

Kedua, terkonsolidasinya aliran-aliran Islam ke dalam politik secara mapan. Jika pada Pemilu 1999 aliran-aliran Islam terfragmentasi dalam berbagai partai politik, pemilu sekarang menunjukkan terkonsolidasinya aliran-aliran Islam ke dalam politik. Dalam Pemilu 1999, NU pecah dalam PKB, PPP, PNU, PKU, dan Partai SUNI; Masyumi pecah dalam tiga partai: PBB, Masyumi Baru, dan Partai Politik Islam Masyumi (PPIM), belum lagi PAN; dan PSII

16 Kristin Samah, "Mengukur Kualitas Demokrasi Melalui Seleksi Partai", *Sinar Harapan*, 8 Desember 2003.

17 Khamami Zada, "Partai Islam dan Pemilu 2004", *Kompas*, 19 Desember 2003.

---

---

pecah dua: PSII dan PSII 1905. Kini fragmentasi itu kian merapat, cukup tiga aliran besar: Islam tradisional, Islam modernis, dan Islam baru dengan lima partai Islam: PPP, PBB, PKS, PBR, dan PPNUI, serta dua partai yang amat dekat dengan dua aliran Islam terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah), yakni PKB dan PAN.

**(Ahmad Nyarwi)**

#### **Daftar Pustaka**

- Baran, Zeyno, "Turkey Divided", *Journal of Democracy*, Vol. 19, No. 1, 2008.
- Crouch, Harold, "The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia", dalam Harold Crouch (Eds), *Islam in Southeast Asia : The Recent Development*, Singapore, ISEAS, Working Paper, No.1., Januari 2002.
- Joesoef, Daoed, "Kemelut Politik di Pakistan", *Suara Pembaruan*, 30 Oktober, 2007
- Khamami Zada, "Partai Islam dan Pemilu 2004", *Kompas*, 19 Desember 2003.
- McDonald, Scott B dan Jonathan Lemco, *Islam Politik di Asia Tenggara*, diakses dari <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg01661.html>.
- Mujani, Saiful, *Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Soeharto Indonesia*. Desertasi untuk memperoleh gelar Doktor (Doctor of Philosophy) dalam Ilmu Politik pada The Ohio State University, 2003.
- Mujani, Saiful, "Pemilu 2004 dan Fenomena Muslim Demokrat", *Tempo*, 21 Desember 2003.
- Pelly, Usman, "Partai politik Islam Di Persimpangan Jalan", *Harian Waspada*, 19 Pebruari 2008.
- Purwoko, Bambang, "Perilaku Elit Agama Dalam Dinamika Politik Lokal", *Kedaulatan Rakyat*, 31 Agustus 2006.
- Samah, Kristin, "Mengukur Kualitas Demokrasi Melalui Seleksi Partai", *Sinar Harapan*, 8 Desember 2003.
- Solihat, Ade, "Kemalisme, Budaya dan Negara Turki", Makalah disampaikan pada Ceramah Umum KEMALISME: Budaya dan Negara Turki, Departemen Linguistik dan Departemen Susastra FIB UI, 10 Mei 2005.
- Sumartana, Th. , "Measuring The Significance of Religious Political Parties and Pluralist Parties in the 1999 General Election in Indonesia", *Inter-Religio*, 36, Winter, 1999.
- Su'ud, Abu, "Ayat No, Kiai Yes", *Suara Merdeka*, 17 Maret, 2004.
- Ufen, Andreas, *Political Parties in Post-Soeharto Indonesia : Between "politik aliran " and Philippinisation*, Working Papers. German Institute of Global and Area Studies (GIGA), No. 37, 2006.
-

---

**PEMIMPIN UMUM**

---

Denny JA

---

**REDAKSI**

---

Eriyanto (Ketua)

---

Widdi Aswindi

---

Eka Kusmayadi

---

Sukanta

---

Arman Salam

---

Setia Dharma

---

Sunarto Ciptoharjo

---

Redaktur Tamu: Bagus Sartono & Ahmad Nyarwi

---

**SEKRETARIS REDAKSI**

---

Dian Olivia Anggraeni

---

**LINGKARAN SURVEI INDONESIA (LSI)**

---

Jl. Raya Venesia EB 1, Kompleks Bukit Gading Mediterania

---

Kelapa Gading, Jakarta Utara

---

Telp (021) 4514701, 4514704, Fax (021) 45858035, 4587336

---

[www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id)

---

Kajian bulanan ini diterbitkan tiap awal bulan, berisi tentang analisis fenomena sosial politik di Indonesia berdasarkan database dan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia. Diperbolehkan memperbanyak atau mengutip bagian dari kajian bulanan ini, dengan menyebut sumber tulisan. Untuk permintaan berlangganan (gratis) kajian bulanan ini, bisa menghubungi Dian Anggraeni Olivia (email: [dian@lsi.co.id](mailto:dian@lsi.co.id)). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) adalah perusahaan profesional yang mengkhususkan diri pada kegiatan riset opini publik—baik survei politik (nasional, lokal) maupun survei untuk kalangan bisnis. Selain riset, LSI juga konsultan politik bagi kepala daerah, partai politik ataupun politisi.